

**PENGARUH POLITIK KELUARGA KASUBA DALAM  
PERGULATAN POLITIK DI KABUPATEN HALMAHERA  
SELATAN**



**SRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sarjana (S.Sos)  
Pada Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuludin Adab Dan Dakwah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu  
2022*

Oleh

MUHAMMAD SYAHRUL SOULISA

NIM: 18.2.17.0005

**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU**

**2022**

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “Pengaruh Politik Keluarga Kasuba Dalam Pergulatan Politik Di Kabupaten Halmahera Selatan (Studi Kasus Di Kabupaten Halmahera Selatan)” adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari ia terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuatkan oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu.....2022

Penyusun,

Muhammad Syahrul Soulisa

NIM : 18.2.17.0005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul **Pengaruh Politik Keluarga Kasuba Dalam Pergulatan Politik Di Kabupaten Halmahera Selatan (Studi Kasus di kota Bacan kabupaten Halmahera Selatan)** oleh mahasiswa atas nama Muhammad Syahrul Soulisa NIM: 182170005, Mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diseminarkan.

Palu, \_\_\_\_\_ 14 Juli 2022 M  
15 Dzulhijjah 1443 H

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag**

**NIP : 196509011996031001**

**Dr. H. Muhtadin Dg. H. Mustafa, M.H.I**

**NIP : 1970092519980031003**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt, karena hanya berkat izin dan kuasa-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **”Pengaruh Politik Keluarga Kasuba Dalam Pergulatan Politik Di Kabupaten Halmahera Selatan (Studi Kasus Di Kabupaten Halmahera Selatan)”**. Dan Alhamdulillah Terselesaikan.

Shalawat dan salam, senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, serta para sahabat, sanak keluarga dan pengikutnya.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun alhamdulillah berkat usaha, kerja keras, kesabaran, do’a serta dukungan baik bersifat materi maupun bersifat moril sehingga hambatan tersebut dapat teratasi dan kemudian skripsi ini terselesaikan. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan pengarahan. Maka penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Kedua orang tua Penulis yaitu Bapak Bader Soulisa dan Ibu Dahlia Usman.

Dan saudara kandung penulis yaitu dr Muhammad Rifqi Soulisa, Muhammad Rizal Soulisa S.H.,M.H Muhammad Faris Soulisa S.T yang telah mendoakan, memberikan motivasi, dan mendidik penulis dalam kegiatan studi dari jenjang

pendidikan dasar sampai saat ini. Semoga Allah membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmat-Nya.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin M.Ag selaku Warek I, Bapak Dr. Kamarudin M.Ag selaku Warek II dan Bapak Dr. H. Mohamad Idhan selaku Warek III beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Penulis dalam segala hal.
3. Bapak Dr. H. Sidik, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Bapak Mokh Ulil Hidayat, S Thahir, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan kelembagaan, Bapak Dr. Syamsuri, S.Ag.,M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dr. Hj. Nurhayati, S.Ag., M.Fil.i selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama yang telah memberikan beberapa kebijakan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Fitriingsih, S.S., S.Pd. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab yang telah memberikan dukungan dan motifasi kepada penulis
5. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Muhtadin Dg. H. Mustafa, M.H.I. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing Penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.

6. Bapak Noorwahid Sofjan, MA. selaku dosen pembimbing akademik yang dengan iklas telah memibing penulis dalam setiap proses pemyelesain studi sehingga sesuai dengan harapan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negri (UIN) Datokarama Palu, yang dengan setia, tulus dan iklas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
8. Seluruh staf akademik dan umum Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
9. Muhammad Torik Ahmad dan saudara Muh Hardiansyah yang sedang sama – sama berjuang menyelesaikan tugas akhir di UIN Datokarama Palu.
10. Teman-teman seperjuangan PPI 2018 yang selalu memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya penelitian ini.
11. Sumarlin Suardi S.H yang selalu meluangkan waktunya untuk Shering dan banyak membantu dalam penyelesaian skripsii ini.
12. Inka nurhasanah saudara angkat penulis yang telah memberikan banyak bantuan dan shering kepada penulis
13. Seluruh teman-teman HMJ PPI dan DEMA UIN Palu 2021 yang selama ini selalu membantu dan memberikan motivasi kepada Penulis.
14. Teman-teman Kompleks Palu Barat, Risal My Assad, Rey Marang, Arman Maulana Rahim sidiq abdur wahyu imam effendi hajir dan afif terimah kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

15. Teman-teman Mentoring Al-Khalid saudara Sadik muntasir, fajri ardiansyah, yusril maulana, Awaludin, yusran latif, Syarif, zulham, Fauzan, figo, muzawwir yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis.
16. Teman-teman LDK Al-Abrar dan KAMMI Komisariat UIN Palu yang menjadi tempat penulis menimba ilmu organisasi di kampus UIN Datokarama Palu
17. Saudara Abdul kafi, roy, ramli dan sofyan yang telah membantu dalam proses Penelitian
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian. Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini, Penulis mohon maaf serta terima kasih atas bantuan, motivasi dan kerjasamanya. Penulis senantiasa mendoakan semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

14 juli 2022 M  
Palu, \_\_\_\_\_  
15 Dzulhujjah 1443 H  
Penulis

**Muhammad Syahrul Soulisa**  
**NIM. 182170005**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Penegasan Istilah dan Definisi Operasional .....	10
E. Garis-garis Besar Isi .....	12
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Pengertian Politik .....	15
C. Tinjauan Politik Islam .....	31
D. Politik keluarga .....	20
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian .....	41
C. Kehadiran Peneliti .....	42
D. Data dan Sumber Data .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data .....	43
F. Analisis Data .....	45
G. Pengecekan dan Keabsahan Data .....	45

**BAB IV PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum kabupaten Halmahera Selatan dan Silsilah Keluarga Kasuba..... 46
- B. Pengaruh Politik Keluarag Dalam Demokrasi Indonesia..... 54
- C. Pengaruh Politik Keluarga Kasuba Dalam Pergulatan Politik Di Kabupaten Halmahera Selatan ..... 64

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 69
- B. Saran..... 70

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel I : Data Jumlah Desa Di Kabupaten Halmahera Selatan .....

Bagan : Silsilah Keluarga Kasuba.....

Tabel II : Data Masa Priode Kepemimpina Keluarga Kasuba.....

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Keterangan Telah Meneliti
4. Dokumentasi Penelitian
5. Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Nama** :Muhammad Syahrul Soulisa  
**Nim** :18.2.17.0005  
**Judul** :Pengaruh Politik Keluarga Kasuba Dalam Perpolitikan Di Kabupaten Halmahera Selatan (Studi Kasus Di Kabupaten Halmahera Selatan).

---

Skripsi ini membahas tentang pengaruh politik keluarga kasuba dalam perpolitikan di kabupaten Halmahera selatan Studi Kasus Di Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: Pertama, bagaimana pengaruh politik keluarga dalam demokrasi Indonesia? Kedua, bagaimana pengaruh politik keluarga kasuba dalam pergulatan politik di kabupaten Halmahera selatan?

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif dengan memilih lokasi penelitian di Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwasanya Praktik kekuasaan dengan “memberi” posisi anggota keluarga dalam struktur kekuasaan atau sering disebut dengan politik keluarga di demokrasi Indonesia merupakan situasi demokrasi yang mengikat dan berkelanjutan, pertarungan politik yang berhubungan antara keluarga (politik keluarga) ini, menjadi satu senjata yang kuat bagi seorang dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah

Ada dua hal yang mendasari terjadinya pengaruh politik keluarga dalam demokrasi Indonesia, yaitu Pertama, macetnya kaderisasi partai politik. Kedua, konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi status quo di daerahnya.

Kesimpulan yang diperoleh peneliti adalah pengaruh politik keluarga kasuba dalam perpolitikan di kabupaten Halmahera selatan tidak terlepas dari kondisi adat, budaya serta kultur yang dipegang teguh oleh masyarakat, hal ini merupakan egosentris masing-masing masyarakat yang ingin mempertahankan kekuasaan kelompoknya, dengan melihat latar belakang suku atau keluarga, sehingga kontestasi politik yang terjadi di Halmahera selatan selama 4 dekade ini di dominasi oleh politik keluarga dalam hal ini adalah actor politik kasuba.

Faktor yang berpengaruh dalam perjalanan karir politik keluarga kasuba juga tidak terlepas dari peran tokoh agama dan latar belakang pendidikannya yang merupakan peluang besar dan mendominasi actor politik Kasuba sehingga mendapatkan posisi strategis di pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Manusia adalah makhluk politik (*zoon politicon*), hidup berinteraksi dengan sesama dan saling mempengaruhi. Masing-masing memiliki keinginan yang harus tercapai. Karena masing-masing memiliki keinginan, maka harus dibuat aturan. Bayangkan jika tidak ada aturan, demi meraih keinginannya, manusia bisa saling sikut menyikut, bahkan bisa terjadi hukum rimba dimana yang kuat akan memakan yang lemah atau setidaknya terjadi kekacauan (*chaos*) dan disharmoni sosial. Kemudian aturan tersebut juga harus dibawah kendali yang memiliki otoritas untuk menegakkannya, yaitu pemimpin. *Aturan (undang-undang)* dan kepemimpinan itu dilahirkan dari proses politik, dengan sarana yang bisa bermacam-macam, diantaranya adalah Demokrasi.<sup>1</sup>

Indonesia dipuja sebagai Negara demokrasi terbesar di Asia tenggara. Percontohan bagi Negara lain. Indonesia memiliki kemajemukan yang ada pada diri dan jiwa bangsanya yang menyatukan berbagai macam perbedaan. Negara yang memiliki ideologi pancasila yang melembaga menjadi karakter, nafas dan falsafat hidup bangsa dan menjadi ciri khas Negara Indonesia. Jiwa persatuan dan kesatuan yang di bangun hingga saat menjadi kunci kebersamaan seluruh rakyat Indonesia.

---

<sup>1</sup> Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi*, (cet. I ; Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), V.

Kemajemukan Indonesia terlihat mempesona dengan beragam suku, etnis, bahasa, agama, dan kepercayaan. Negara ini dikelola dan tumbuh atas ide-ide brilian pendiri bangsa. Sebutlah Soekarno, Hatta, Yamin dan Soepomo. Tokoh-tokoh besar yang menggoreskan makna pada ke-indonesiaan.<sup>2</sup>

Hal ini tentunya memiliki dasar dan prinsip yang kuat di bangun oleh the founding father kita dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi Indonesia, Tujuan pemerintahan negara juga pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.

Demokrasi juga yang menjunjung tinggi kebebasan menjadi landasan bagi setiap individu dalam mengaktualisasikan dirinya, termasuk dalam persoalan politik. Kebebasan individu yang dijamin oleh konstitusi di Indonesia mencerminkan tingginya popularitas system demokrasi ini. Akan tetapi, kebebasan tersebut pada akhirnya semakin memperjelas jurang pemisah antara identitas (agama, suku, bahasa, jenis kelamin, dll) yang ada di Indonesia, terutama berkaitan dengan persoalan politik bangsa.

---

<sup>2</sup> Raden Romy Achmad Ramadhan, "Menyelamatkan Demokrasi," 11, (2019) : 1

Praktik kekuasaan dengan “memberi” posisi anggota keluarga dalam struktur kekuasaan atau sering disebut dengan dinasti politik menjadi satu diantara banyaknya sistem pemerintahan yang sering di angkat dalam perjalanan demokrasi indonesia dan kita temui dalam dialektika politik bangsa. Pasalnya, situasi demokrasi yang mengikat dan berkelanjutan dalam pertarungan politik yang mengikat antar keluarga (*politik keluarga*) menjadi satu senjata yang kuat bagi seorang dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah.

Politik keluarga terus hidup dalam bingkai pemerintahan daerah, eksistensi kedinastian mempunyai jalan pertarungan yang bisa di bilang kuat antara lain adalah dengan mempertahankan ambisi, membentuk tim yang kuat, kampanye inovatif dan terorganisir, membangun image di media, dan melakukan lobbis, serta memafaatkan kepopuleran nama keluarga.

Penulis mencoba mengangkat persoalan politik local guna untuk dijadikan bahan literasi dalam melihat politik kekeluargaan dalam proses demokrasi di Indonesia, penulis juga memfokuskan studi kasus dalam pembuatan proposal ini adalah pengaruh keluarga kasuba dalam kompetisi dan pelaksanaan kepemimpinan di kabupaten Halmahera Selatan, hal ini tentu memberikan pengaruh yang cukup besar dalam dekade kepemimpinan politik di Halmehra Selatan.

Menarik untuk dikaji oleh penulis karna dinamika politik local yang terjadi di kabupten Halmahera Selatan merupakan satu fenomena politik yang bisa di bilang berbeda dari politik local yang terjadi di beberapa daerah, hal ini di karenakan usia pemerintahan daerah kabupaten Halmahera Selatan baru berjalan beberapa tahun

selepas terjadinya pemekaran kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2003, dengan umur pemekaran yang masih pucuk dan juga pelaksanaan kekuasaan daerah yang masih dalam tahap desentralisasi itu, actor politik kasuba mampu memegang kendali kekuasaan yang telah berjalan kurang lebih 15 tahun lamanya, dengan pergantian kekuasaan yang juga dipegang oleh marga kasuba.

Dalam proses pemilihan kepala daerah yang didominasi oleh politik keluarga kebanyakan para aktor politik 'incumbent'/petahana berusaha menyusun strategi dalam kerangka mendudukan keluarganya dalam panggung politik pilkada serentak. Data yang dilansir Kemendagri menyebutkan sebanyak 57 kepala daerah yang berhasil mentransfer kekuasaan: dari suami kepada istri, dan dari ayah kepada putranya . Keberhasilan para kepala daerah dalam mentransfer kekuasaan kepada istri, anak, adik dan ipar merupakan strategi baru dalam mempertahankan dan melestarikan kekuasaan keluarga dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Fenomena ini bisa disebut sebagai "*rezim keluarga*" di pilkada<sup>3</sup>

Rezim keluarga ini terjadi karna adanya transisi kekusaan dan juga desentralisasi politik yang di lakukan oleh petahana, sehingga transformasi jabatan terjadi dan melekat kuat di dalam arus politik local. Sebut saja actor politik keluarga kasuba yang terjadi di Halmahera Selatan, bagaimana Muhammad Kasuba membangaun kekuatan politik yang kuat dan kemudian di teruskan oleh Bahrain Kasuba (Ponakan Muhammad Kasuba) dengan posisi terjadinya transisi politik yang

---

<sup>3</sup> Muhtar Haboddin, *Politik Keluarga Dalam Pilkada Serentak*,( Terbitan 2006)

telah disebutkan di atas tadi, Pada saat dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (PILKADA) kekuatan politik yang telah di bangun oleh Muhammad Kasuba menjadi senjata kuat Bahrain Kasuba dalam menduduki kursi bupati pada decade tahun 2016, kekuatan Bahrain pun tidak semuanya di bangun dari transisi politik Muhamad Kasuba, karna Bahrain sendiri merupakan anggota Sekaligus ketua DPRD Kabupaten tahun 2009 sampai 2014, track recordnya yang sudah terbangun ketika menjadi anggota dewan membuat beliau di kenal dan mendapatkan posisi penting di sosio politik di masyarakat.

Gelombang politik keluarga dan politik identitas yang terjadi dalam politik local sangat mengakar dan berpengaruh pada kontestasi pemilihan kepala daerah yang terjadi di kabupaten halmahera selatan. Bagaimana tidak pengaruh yang dibangun oleh masing-masing paslon lebih menguntungkan ketika mereka memobilisasi kekuatan massa pada posisi kekeluargaan.

Tak bisa di pungkiri model demokrasi langsung ikut memberikan ruang yang lebih terbuka dan lebih bebas dalam mengekspresikan kepentingan politik. Sekarang, perkembangan perpolitikan lokal menjadi jauh lebih kompleks dan menarik untuk dianalisis, karena ciri sistem politik era ini berbeda dengan sebelumnya, yakni pluralistik, politisasi, desentralisasi, de-etasisasi dan demokrasi (Sitti Aminah, 2005:82). Fenomena politik uang, kemunculan orang kuat, menguatnya aristokrasi di daerah,

isu tentang putra daerah, sampai pada kekuatan politik berbasis etnis, masih menjadi tema-tema yang menghiasi perpolitikan lokal saat ini.<sup>4</sup>

Dari beberapa proses politik yang terjadi di aras politik local, fenomena yang sering terjadi dan cukup mempengaruhi situasi politik local yang terjadi di Halmahera Selatan adalah berkaitan juga dengan persoalan identitas dan etnis atau suku, dalam pemilihan kepala daerah, identitas etnis dapat dijadikan sebagai kajian oleh partai politik dalam menentukan pasangan calon pada saat pemilihan kepada daerah, sebagai partai pendukung dari pasangan calon, penggunaan identitas etnis dikaji untuk tujuan memenangkan dari pasangan calon yang didukung tersebut, adanya sebuah strategi yang dilakukan oleh partai.

Menjadi satu fakta di lapangan bahwa kekuatan politik keluarga kasuba tidak terlepas dari adanya dukungan dari etnis dan suku yang sangat mendominasi dukungan paslon dari kandidat politik, keuntungan keluarga kasuba karna memiliki elektabilitas yang sangat baik di masyarakat khususnya masyarakat desa yang masih cukup kental pluralisme sosialnya, hal ini di latar belakang oleh adanya persamaan suku antara masyarakat dengan actor politik. Contohnya aktor kasuba yang memiliki basis besar pada posisi kesukun yakni suku Tobelo, yang cukup terbilang besar menjadi penduduk local, tidak hanya suku tobelo tetapi beberapa suku juga ikut mendukung dan bersatu untuk melakukan dukungan terhadap calon keluarga kasuba, antaranya ialah suku Galela, kedekatan historis kedua suku membuat masyarakat dari kedua suku itu lebih mempererat ikatan persaudaraan dengan membuat organisasi

---

<sup>4</sup> Ibid

masyarakat yang diinisiasi dari penggabungan kedua suku tersebut, sehingga lahir organisasi Ikatan Keluarga Tobelo Galela (IKA TOGALE) yang saat ini di ketuai oleh Muhammad Kasuba (Mantan Bupati). Hal ini juga menjadi basis aman dan menambah keuntungan bagi calon dari Keluarga Kasuba untuk melakukan mobilisasi masa, mengingat kabupaten Halmahera Selatan termasuk daerah dengan tingkat penduduk yang memiliki beragam suku yang banyak menjadi faktor pendukung atas terjadinya kenaikan elektabilitas politik keluarga Kasuba.

Dari gambaran di atas masih terlihat bahwa dalam menjustifikasi pilihan politiknya masyarakat juga masih melihat dan mempertimbangkan berdasarkan adanya hubungan etnisitas yang dimiliki dari seorang calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan. Sehingga politik lokal di sana masih sangat kental dengan namanya politik identitas.

Penulis tetap menitik beratkan pada judul yang diangkat dengan membahas dan juga menganalisis kenapa sampai terjadinya pengaruh besar politik keluarga Kasuba dalam pergulatan politik di kabupaten Halmahera Selatan. penjelasan inilah yang melatar belakangi study kasus pada judul yang penulis angkat. Penulis tentunya melihat dinamika ini sebagai bagian dari penelitian yang nantinya penulis lakukan dengan menggunakan metode kualitatif.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, untuk itu penulis mencoba merumuskan dan menjelaskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Politik Keluarga Dalam Demokrasi Indonesia ?
2. Bagaimana Pengaruh Politik Keluarga Kasuba Dalam Pergulatan Politik Di Kabupaten Halmahera Selatan ?

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi batasan permasalahan dalam pembahasan ini adalah mengenai pengaruh politik keluarga yang terjadi di Indonesia dan pengaruh keluarga kasuba dalam perpolitikan di kabupaten Halmahera selatan.

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Yang Ingin Penulis Capai Dalam Penelitian Ini Adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Politik Keluarga Dalam Demokrasi Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Politik Keluarga Kasuba Dalam Pergulatan Politik Di Kabupaten Halmahera Selatan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan bagaimana pengaruh politik dinasti dalam demokrasi Indonesia dan politik keluarga kasuba dalam pergulatan politik di Halmahera selatan.

Secara Praktis:

1) Untuk Peneliti

- a. Penelitian ini akan menambah khazanah pengetahuan penulis.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu (SI) dalam bidang pemikiran politik islam.

2) Untuk Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

- a. Penelitian ini di samping sebagai bahan bacaan mahasiswa, diharapkan juga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pemecahan masalah tentang politik keluarga kedepannya sehingga membawa keberhasilan yang optimal demi meningkatkan kualitas mahasiswa UIN DK Palu.
- b. Sebagai khazanah dan wawasan pembelajaran serta tambahan referensi.

#### ***D. Penegasan Istilah***

1. Pengaruh

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015:1045), pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang,benda) yang ikut membentuk watak,kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu

yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada disekitarnya (Yosin, 2012:1). Menurut surakhmad (2012: 1), Pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari sesuatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan yang dapat membentuk kepercayaan atau perubahan. Dapat disimpulkan pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang dapat timbul dari sesuatu, baik itu watak, orang, benda, kepercayaan dan perbuatan seseorang yang dapat mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitarnya.

## 2. Politik

Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti Negara kota. Secara etimologi kata politik masih berhubungan erat dengan kata politis yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata politisi berarti orang-orang yang menekuni hal-hal yang berkaitan dengan politik. Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik.

Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif. Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan instrumen otoritatif dan koersif dalam pembuatan keputusan publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari

suatu keputusan yang disepakati. Jika ditarik benang merahnya, definisi politik menurut Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik (polity) untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik.<sup>5</sup>

Dari penjelasan teori politik di atas dapat di artikan secara sederhana bahwa politik adalah cara atau strategi menguasai dan memimpin sebuah kekuasaan. Dengan demikian politik adalah satu ilmu pemerintahan (kekuasaan) yang mempelajari tentang kenegaraan dan juga kekuatan kepemimpinan (*leadership*).

### 3. Kasuba

Silsilah merupakan garis keturunan seseorang, khususnya bagi masyarakat timur. Silsilah merupakan garis keturunan yang menggambarkan asal usul seseorang dan hubungannya dengan keluarga dalam beberapa generasi. Adanya silsilah dipengaruhi oleh terjadinya perkawinan antara dua orang laki-laki dan perempuan dan kemudian memiliki keturunan, dalam bidang linguistic atau ilmu Bahasa merupakan keturunan keluarga Bahasa yang dimulai dari Bahasa induk dan diikuti oleh Bahasa-bahasa turunannya.

Secara silsilah Kasuba merupakan seseorang yang lahir di bumi moloku kieraha (Maluku Utara) tepatnya di kepulauan Obi Kabupaten Halmahera Selatan. Secara garis keturunan Kasuba merupakan keturunan dari suku Tobelo, salah satu

---

<sup>5</sup> Gabriel A. Almond Dalam Basri Seta. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner. 3

suku asli dan besar yang ada diprovinsi Maluku Utara, suku tobelo juga terkenal selalu melakukan aktivitas nomaden atau berpindah pindah tempat dalam Bahasa tobelo di kenal dengan sebutan (Canga-canga), sehingga ini juga merupakan salah satu factor yang melatar belakangi adanya suku tobelo yang tinggal dan hidup menetap di beberpa wilayah yang ada di provinsi maluku utara.

#### 4. Pergulatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Pergulatan adalah pergumulan. Arti lainnya dari pergulatan adalah perjuangan. Pergulatan memiliki 3 arti. Pergulatan berasal dari kata dasar gulat. Pergulatan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Arti dari pergulatan dapat masuk ke dalam jenis kiasan sehingga penggunaan pergulatan dapat bukan dalam arti yang sebenarnya. Pergulatan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pergulatan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

#### 5. Kabupaten Halmahera Selatan

Kabupaten Halmahera Selatan merupakan salah satu kabupaten di provinsi Maluku Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Labuha. Sebagian besar wilayah Halmahera Selatan merupakan perairan, dengan luas sebesar 31.484,40 km<sup>2</sup> atau mencapai 78 persen dari total luas Kabupaten Halmahera Selatan yang mencapai 40.263,72 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 228.771 jiwa (2019).

Kabupaten Halmahera Selatan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Utara atau saat ini menjadi Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 2003 tentang pemekaran wilayah Kabupaten Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Selatan pada awal pembentukannya memiliki 9 kecamatan namun kini menjadi 30 kecamatan.<sup>6</sup>

#### ***E. Garis-garis Besar Isi***

Dalam skripsi ini terdiri dari tiga bab yang masing-masing memiliki pembahasan sendiri-sendiri, namun saling berkaitan satu dengan yang lain. Untuk mengetahui gambaran umum dari ke tiga bab tersebut, maka penulis akan mengemukakan garis-garis besar isi sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, bab ini merupakan pengantar dalam sebuah penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

Bab ke dua, berisikan tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai kerangka acuan teoritis di mana penulis menggunakan beberapa buku yang berkaitan dengan rumusan masalah. Dalam bab ini dijelaskan mengenai relevansi penelitian terdahulu serta gambaran umum yang mengarah kepada pengaruh politik keluarga kasuba dalam pergulatan politik yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan.

---

<sup>6</sup> Pemda Hal-Sel, *Profil Kabupaten Halmahera Selatan*.

Bab ke tiga adalah metode penelitian yang terdiri dari uraian tentang teknik pengumpulan data yakni observasi dan wawancara (*interview*) disertai prosedur pengumpulan data dan terakhir teknik analisa data.

Bab ke empat memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan permasalahan yang dikaji dan diangkat sebelumnya berdasarkan hasil wawancara dan keterangan yang penelitian lakukan. Yaitu bagaimana Gambaran Umum kabupaten Halmahera Selatan, bagaimana Silsilah keluarga kasuba, pengaruh politik keluarga dalam demokrasi Indonesia dan pengaruh politik keluarga kasuba dalam perpolitikan di kabupaten Halmahera selatan.

BAB V merupakan penutup dari seluruh rangkaian isi skripsi yang menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian terdahulu*

Sebelum melakukan penelitian, sebelumnya penulis telah menemukan karya tulis ilmiah yang relevan dengan judul yang penulis teliti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh suyadi mahasiswa (S1) ilmu hukum islam fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. Yang berjudul “Bentuk dan Karakter Politik di Indonesia”. Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa 1. Politik Keluarga di Indonesia merupakan wujud dari perilaku politik (political behavioralisme) para aktor politik dalam melagengkan, mengamankan kekuasaan politik dengan menempatkan kerabat keluarga atau familinyadi dalam posisi strategi baik di bidang formal pejabat public (pemerintahan) maupun formal (proyek-proyek atau bisnis). 2. Politik Keluarga di Indonesia merupakan politik dinasti Negara dunia ketiga, yang berarti bahwa politik keluarga yang berkembang lebih kuat beridentik dengan keturunan dari pada kualitas aktor politik dan kaderisasi partai politik di Negara maju. Misalnya, dinasti soekarno dan soeharto dan seterusnya di Indonesia. berbeda dengan kenedy Clinton dan bush di amerika serikat hatoyama di jepang dan lee di singapura, yang pada umumnya terjun ke dunia politik harus melewati fase pengkaderan politik yang cukup lama

baik dalam internal (keluarga) maupun eksternal (kaderisasi di dalam partai politik)<sup>7</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh ILHAM RAMADHAN Mahasiswa (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018. Yang Meneliti Tentang “Politik keluarga Di Aceh (Studi Kasus Kabupaten Nagan Raya)”. Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) Histori Lahirnya Nagan Raya, Sejak terbentuknya Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2002, H.T. Zulkarnaini atau yang sering di sapa “Ampon Bang” terus memimpin Nagan Raya hingga akhir masa jabatannya pada tahun 2017 Ampon Bang sudah memimpin kurang lebih selama 15 tahun. Ampon Bang memenangkan pilkada selama dua kali di Nagan Raya, yaitu pada pilkada perdana di Nagan Raya tahun 2007 dan pilkada kedua pada tahun 2012. Namun, sebelum pilkada berlangsung di Nagan Raya, Ampon Bang telah menjabat sebagai Pj. Bupati sejak Nagan Raya terbentuk yaitu pada tahun 2002 selama 4 tahun. (2) Strategi Mempertahankan Politik keluarga Ampon Bang di Nagan Raya<sup>8</sup>
3. Penelitian yang di lakukan oleh Dafrin Muksin, Titin Purwaningsih, Achmad Nurmandi dengan judul “Praktik Politik Di Aras Lokal Pasca Reformasi”

---

<sup>7</sup> Suyadi Mahasiswa (S1) Ilmu Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yokyakarta Yang Berjudul “*Bentuk Dan Karakter Politik Dinasti Di Indonesia*” (2014): 93.

<sup>8</sup> Ilham Ramadhan, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Prodi Ilmu Politik ; “*Politik Dinasti Di Aceh (Studi Kasus Kabupaten Nagan Raya)*, ” : (2018) :4.2

dengan Studi Kasus “Abdul Gani Kasuba Dan Ahmad Hidayat Mus Pada Pilkada Provinsi Maluku Utara” dalam studinya di simpulkan bahwa, Mahalnya biaya politik, serta macetnya fungsi kaderisasi partai mengakibatkan terjadinya pragmatisme. Yaitu, dengan mengukung para elit (para pemodal) tersebut dalam kontestasi Pilkada. Hal itu mendorong terjadinya praktik dinasti politik dan berdampak pada partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam perayaan pesta demokrasi baik dalam Pilkada di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan pemilihan legislatif. Praktik dinasti politik dilakukan oleh Ahmad Hidayat Mus maupun Abdul Gani Kasuba pada Pilkada Provinsi Maluku Utara, di legitimasi oleh modalitas yang kuat baik modalitas ekonomi, politik, kultural, dan sosial. Semakin banyak modalitas yang dimiliki, maka semakin menentukan kemenangan pada kontestasi Pilkada. Abdul Gani Kasuba memiliki kelemahan pada aspek modal ekonomi, ketika dibandingkan dengan Ahmad Hidayat Mus. Untuk itu, Abdul Gani Kasuba memilih wakilnya yang memiliki ekonomi yang dapat mengimbangi modal ekonomi Ahmad Hidayat Mus. Pada modal politik keduanya memiliki legitimasi yang sepadan. Dari Aspek modal kultur dan sosial Abdul Gani Kasuba lebih kuat daripada Ahmad Hidayat Mus. Karenanya, modalitas yang dimiliki oleh Abdul Gani Kasuba lebih besar dari Ahmad Hidayat Mus, sehingga mengantarkan Abdul Gani Kasuba menduduki kekuasaan sebagai Gubernur dua periode pada Pilkada 2013 dan 2018. Praktik dinasti politik juga dilakukan melalui politik dominasi ataupun kontrol atas partai politik

dalam melakukan recruitment calon kandidat yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislate di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Abdul Gani Kasuba Melakukan kontrol terhadap partai PKS dan Ahmad Hidayat Mus Melakukan kontrol atas Partai Golkar. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya penyempitan ruang partisipasi publik untuk terlibat dalam kontestasi Pilkada. Dalam kontestasi Pilkada Partai PKS cenderung memberikan dukungan kepada keluarga Kasuba, sedangkan Partai Golkar cenderung mendukung keluarga Mus. Dukungan partai politik diberikan berupa dukungan secara kelembagaan partai serta secara basis massa untuk memilih kandidat dari keluarga politik yang telah diusung. Dan praktik dinasti politik menyebabkan terjadinya penyempitan ruang partisipasi publik untuk terlibat dalam pesta demokrasi lokal melalui Pilkada.<sup>9</sup>

Kajian terdahulu relevan dengan judul penulis, namun terdapat beberapa hal yang membedakan judul penulis dengan beberapa kajian diatas, di antaranya :

1. Perbedaan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di Yogyakarta, dan Aceh. Sedangkan penelitian ketiga mempunyai lokasi yang sama yakni Maluku Utara, tetapi penelitian penulis lebih spesifik yaitu di kabupaten Halmahera Selatan.

---

<sup>9</sup> Dafrin Muksin, Titin Purwaningsih, Achmad Nurmandi, "Praktik Dinasti Politik Di Aras Lokal Pasca Reformasi: Studi Kasus Abdul Gani Kasuba Dan Ahmad Hidayat Mus Pada Pilkada Provinsi Maluku Utara" *jurnal wacana politik* 4, no 2 (2019)

2. Penelitian sebelumnya lebih focus kepada persoalan Bentuk dan Karakter Politik dinasti di aceh, yang lebih di fokuskan pada dampak positif dan negaitf kepemimpinan politik dinasti aceh, serta Praktik Dinasti Politik diaras Lokal Pasca Reformasi yang terjadi pada calon kandidat gubernuer Maluku utara yang lebih di fokuskan pada elektabilitas calon secara finansial dan ketokohan politik sedangkan penelitian yang di lakukan penulis lebih di titik beratkan pada persoalan pengaruh perpolitikan dinasti keluarga kasuba pada perpolitikan di kabupaten Halmahera selatan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh penulis juga lebih focus kepada strategi dan juga kekuatan yang di miliki oleh tokoh politik dari marga kasuba dalam melakukan kontestasi politik local di Halmahera Seatan, berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian kali ini mengadopsi beberpa factor pendukung yang memberikan ruang gerak pada tokoh politik kasuba, antara lain ialah factor silsilah,suku,identitas dan agama yang juga ikut melatar belakangki kekuatan politik yang di bangun oleh actor politik kasuba.
4. Penelitian ini juga di latar belakangki oleh kondisi politik local yang pada decade 1999 sampe sekarang masih diduduki oleh marga kasuba hal ini cukup memiliki pengaruh besar bagi masyarakat di Kabupaten Halmahera selatan, inilah yang membuat penulis mencoba

mengangkat dan juga mencari tahu apa yang melatar belakangi terjadinya Politik keluarga kasuba di kabupaten Halmahera selatan.

5. Penulis mencoba menjabarkan apa saja yang mendukung terjadinya pengaruh elektabilitas politik, menjaga eksistensi politik, mobilisasi masa, mengamankan serta melanggengkan kekuasaan keluarga kasuba pada pergulatan politik local di Kabupaten Halmahera Selatan.

### ***B. Pengertian Politik***

Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang berarti Kota yang berstatus negara kota (city state).<sup>10</sup> Dalam Negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya.<sup>11</sup>

Dalam bahasa Indonesia kata politik mempunyai beberapa pengertian, yaitu: (i) ilmu/pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan; (ii) segala urusan dan tindakan ( kebijakan, siasat, dan sebagainya ) mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain; dan (iii) kebijakan, cara bertindak ( dalam menghadapi atau menangani suatu masalah ).<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Hidajat Imam, *Teori-Teori politik*. ; (Malang: Setara press : 2009) :2

<sup>11</sup> Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik*. ( Jogjakarta: Indie Book Corner :2011): 2

<sup>12</sup> Departemen P dan K, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. Ke-8 (1995):

Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (polity) yang terbaik.<sup>13</sup>

Namun demikian, definisi politik hasil pemikiran para filsuf tersebut belum mampu memberi tekanan terhadap upaya-upaya praksis dalam mencapai politik yang baik. Meskipun harus diakui, pemikiran politik yang berkembang dewasa ini juga tidak lepas dari pengaruh para filsuf tersebut. Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berbuhungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama ; 2007):14

<sup>14</sup> Gabriel A. Almond dalam Basri Seta. *Pengantar Ilmu Politik*. (Jogjakarta: Indie Book Corner): 3

Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan public, penekanan terhadap penggunaan instrumen otoritatif dan koersif dalam pembuatan keputusan publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu keputusan yang disepakati. Jika ditarik benang merahnya, definisi politik menurut Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik (polity) untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik. Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew Heywood. Menurut Andrey Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.<sup>15</sup>

Dengan definisi tersebut, Andrew Heywood secara tersirat mengungkap bahwa masyarakat politik (polity) dalam proses interaksi pembuatan keputusan publik juga tidak lepas dari konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan kata lain, masing-masing kelompok saling mempengaruhi agar suatu keputusan publik yang disepakati sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu. Konflik dan kerja sama dalam suatu proses pembuatan keputusan publik adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses interaksi antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan

---

<sup>15</sup> Ibid. Andrew Heywood dalam Budiardjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2007): 16

setiap kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain.<sup>16</sup>

Oleh sebab itu, sebuah kelaziman dalam realitas sehari-hari sering dijumpai aktivitas politik yang tidak terpuji dilakukan oleh kelompok politik tertentu demi mencapai tujuan yang mereka cita-citakan. Peter Merkl mengatakan bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri-sendiri (politics at its worst is a selfish grab for power, glory, dan riches).<sup>17</sup>

Defenisi lain juga disebutkan oleh Abdulkadir b nambo dan Muhammad rusdiyanto puluhuluwa, Bahwa Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Pada kodratnya ia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Karena itulah politik selalu merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya. Karena manusia adalah inti utama dari politik, maka apapun alasannya pengamatan atau telaah politik tidak begitu saja meninggalkan faktor manusia.<sup>18</sup>

Oleh karena itu kata “Politik”, yang berasal dari kata “*Politic*” menunjukkan sifat pribadi atau perubahan secara leksikal, kata asal tersebut diartikan “*Acting or judging wisely, well judged, prudent*” (A.S Hornby, 1974 : 645). Kata ini sejak dulu

---

<sup>16</sup> Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Grasindo, 1992) :18

<sup>17</sup> Peter Merkl dalam Budiardjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007): 16

<sup>18</sup> Abdulkadir b nambo dan Muhammad rusdiyanto, *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik* 21. No. 2 (2015) : 262-263.

dikenal dalam bahasa atau kata latin dengan “*Politicus*” yang diartikan :*Relating to a citizen*, kedua kata ini berasal dari kata “*polis*” yang memiliki makna *city* yaitu kota. Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa politik merupakan kerangka sosial yang berfokus kepada kekuasaan dan kepemimpinan Negara dengan mengurus wilayah kekuasaan sehingga terkontrol dan mempunyai kewenangan penuh dalam melaksanakan kekuasaan Negara sehingga terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat.

### ***C. Tinjauan Politik dalam Islam***

Pengertian politik Dalam bahasa Arab biasanya diwakili oleh kata *alsiyasah*<sup>19</sup> dan *daulah*, Kata *siyasah* yang berarti mengelola, mengatur, memerintah dan melarang sesuatu. Atau secara definisi berarti prinsip prinsip dan seni mengelola persoalan publik (ensiklopedia ilmu politik). Menurut Yusuf Qardhawi dalam Kamus AlKamil, bahwa politik adalah semua yang berhubungan dengan pemerintahan dan pengelolaan masyarakat madani.

Inilah pemahaman Nabi akan definisi politik atau As-siyasah, disinilah pengertian politik menemukan naungan rindang yang melindunginya dari hujan asumsi yang menyebut bahwa istilah politik tidak pernah ada dalam literatur Islam. Imam Syafii tidak setuju dengan adanya istilah politik, melainkan lebih sepakat dengan syariat. Pengertian syariat itu sendiri adalah semua arahan, batasan, perintah

---

<sup>19</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran Kata Siyasat Berasal Dari Kata Sasa. Kata Ini Dalam Kamus Al-Munjid Dan Lisan Al-., Arab Berarti Mengatur, Mengurus Dan Memerintah. Siyasah Adalah Membuat Kemaslahatan Manusia Dengan Membimbing Mereka Ke Jalan Yang Menyelamatkan.* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1999) :22-23.

dan larangan yang diberikan Rasul. Sehingga kata Imam Syafii, “tidak ada politik, kecuali sesuai dengan “syariat”. Seperti yang kita ketahui, politik tidak lahir di masa Rasul SAW, karena sejak manusia mengenal kata memimpin dan dipimpin, maka politik ada saat itu. Dikarenakan pengertian dan aplikasi politik di masa sebelum datangnya Islam itu adalah kebusukan dan kelicikan, maka banyak orang beragama Islam tidak sepakat dengan politik dalam Islam. akan tetapi kita juga harus melihat makna utama dari politik itu sendiri yaitu pengelolaan urusan manusia, sedangkan baik dan buruknya pengelolaan, itu urusan lain (Muhammad Elvandi, 2011:34). Sehingga dapat diambil kesimpulan awal bahwa pengertian politik dalam Islam adalah segala aktivitas dalam mengelola persoalan publik atau masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>20</sup>

Kata *Siyasah* juga sering dijumpai dalam bidang kajian hukum, yaitu ketika berbicara masalah *imamah*, sehingga dalam fiqih dikenal adanya bahasan *fiqih siyasah*. Demikian pula kata *daulah* pada mulanya dalam Al-Qur’an digunakan untuk kasus penguasaan harta dikalangan orang-orang kaya, yaitu bahwa dengan zakat diharapkan harta tersebut tidak hanya berputar pada tangan-tangan orang kaya. Karena menurut sifatnya harta tersebut harus mengalir atau berputar, dan tidak hanya dikuasai oleh orang-orang yang kaya (*daulatun baina agniya*), kata *daulah* tersebut juga digunakan untuk masalah politik yang sifatnya berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain.

Dalam sistem politik Islam, Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah S.A.W. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah-perintah Rasulullah S.A.W dan tidak mengambil selain dari pada Rasulullah S.A.W untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Allah berfirman dalam Q.S AlHasyr/59 : 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.* (Q.S AlHasyr: 7)<sup>21</sup>

Allah juga berfirman dalam Q.S AnNisa/4 : 65.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

*“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap*

---

<sup>21</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur’an Al-Bantani dan Terjemahnya, (Jakarta: Pemerintah Provinsi Banten, 2014) : 546.

*putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”. (An-Nisa“: 65)<sup>22</sup>*

Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (*siyasah*) dalam sabdanya: “Adalah Bani Israil, mereka diurus urusannya oleh para nabi (*tasusuhumul anbiya*). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantikannya. Tidak ada nabi setelahku namun, akan ada banyak para khalifah”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Jelaslah bahwa politik berarti atau siyasah itu makna awalnya ialah mengurus urusan masyarakat. Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan cara menghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan.

Hal ini sesuai dengan teori politik yang dikemukakan oleh para ahli politik barat, antara lain :

- Rod Hague et al.: Menurutnya “Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggotanya (Politics is the activity by which groups reach binding collective decisions through attempting to reconcile differences among their members).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Ibid, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur’an Al-Bantani dan Terjemahnya,,, : 88.

<sup>23</sup> Miriam Budiardjo, “Dasar-dasar Ilmu Politik” : 16. dari buku Rod Hague et al., Comparative Government and Politics (London: Macmillan Press, 1998) :.3.

- Menurut Andrew Heywood: “Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama (Politics is the activity through which a people make, preserve and amend the general rules under which they live and as such is inextricably linked to the phenomenon of conflict and cooperation).<sup>24</sup>

#### ***D. Politik Keluarga***

Secara harfiah, Politik keluarga dapat dipahami sebagai strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaan, memberikan dukungan serta mengawasi proses politik transisi keluarga dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah digenggam kepada orang lain yang masih merupakan kalangan sanak keluarga.<sup>25</sup>

Adapun berbagai gejala yang mendasari terbentuknya suatu politik kekeluargaan dapat dianalisis dari dua hal. *Pertama*, macetnya kaderisasi partai politik dalam menjaring calon kepala daerah yang berkualitas, sehingga menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan sanak keluarga kepala daerah untuk menjadi pejabat publik. *Kedua*, konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi status quo di daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan

---

<sup>24</sup> Ibid, Miriam Budiardjo, “Dasar-dasar Ilmu Politik”, : 16. dari buku Andrew Heywood., Politics (London: Macmillan Press, 1997),: 4.

<sup>25</sup> Wasisto Raharjo Djati, Pusat Kajian Sosiologi Fisip-Ui. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, (Juli 2013) : 204

petahana. Kedua gejala umum tersebut menimbulkan adanya sikap pro dan kontra dalam pemahaman dinasti politik tersebut. Sikap pro dan kontra kemudian berkembang menjadi perdebatan diskursus dalam revisi RUU Pilkada.<sup>26</sup>

Dari dua pandangan yang telah di jebarkan di atas penulis melihat bahwa gejala umum yang pertama tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di tubuh keluarga Kasuba, karna fakta yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, bukan pada macetnya kaderisasi partai, tapi kekuatan sosio politik dari kader partai dalam hal ini actor politik kasubalah yang membuat elektabilitas partai menjadi naik dan mempengaruhi eksistensi partai dalam roda organisasi, serta memiliki potensi besar yang menguntungkan partai politik di dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan peningkatan bagi kaderisasi di tubuh partai politik. Namun di lain sisi, tidak bisa di nafikkan bahwa ada dua pihak yang saling pro dan kontra mengenai sepakat dan tidaknya politik kekeluargaan dalam kekuasaan, dengan posisi kontra menginginkan pembatasan dinasti politik dengan cara membatasi sanak saudara kepala daerah untuk maju dalam Pemilu, sementara yang pro mengusulkan dinasti politik tak perlu dilarang, hanya saja sistem kaderisasi partai politik di daerah perlu dibenahi.

Para actor politik atau elit kelompok mendasari terjadinya gelompong politik keluarga yang kuat sama halnya yang di kemukakan oleh Pareto dalam Varma (2007 : 206) menurutnya yang disebut dengan kelompok elit adalah sekelompok kecil individu yang memiliki kualitas-kualitas terbaik, yang dapat menjangkau pusat kekuasaan sosial politik. Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang

---

<sup>26</sup>Ibid

mampumenduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat.<sup>27</sup>Pareto meyakini bahwa elit yang tersebar pada sektor pekerjaan yang berbeda itu umumnya berasal dari kelas yang sama. Yakni orang-orang yang kaya dan pandai. Ia menggolongkan masyarakat kedalam dua kelas, lapisan atas (elite) dan lapisan bawah (non-elite). Lapisan atas atau kelas elit terbagi dalam dua kelompok, yakni elit yang memerintah (governing elite) dan elit yang tidak memerintah (non-governing elite). Sementara Gaetano Mosca menyebutkan bahwa di setiap masyarakat yang berbentuk apapun senantiasa muncul dua kelas, yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah memiliki jumlah yang sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan- keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan, yang kadangkadang bersifat legal, arbitrer, dan menggunakan kekerasan.

Keyakinan yang di sampaikan Pareto mendekati realitas proses politik yang terjadi di tubuh keluarga Kasuba, actor politik Kasuba mengambil posisi menguntungkan yang tersebar pada sector pekerjaan, track record yang di miliki mampu memberikan posisi strategis pada kubu kasuba, sama halnya dengan pembagian kelas yang di kemukakan oleh pareto, bahwa kelas atas (elit) menduduki kursi kekuasaan dengan di kendalikannya pelaksanaan kekuasaan sesuai dngan legalitas yang di miliki, actor Kasuba menggunakan kelas elit ini dalam melaksanakan kekuasaan yang terpusat pada jabatan pemerintah di tambah dengan

---

<sup>27</sup> Winda Rosalina Affendi, Jurnal Trias Politika, "*Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten*" (Vol 2. No.2 : Oktober 2018) 233 - 247

sector pendukung membuat jalan politik yang dilakukan oleh aktor Kasuba mendapat peluang pada sosio-politik dan sosio-kultural di masyarakat.

Adanya sikap pro dan kontra terhadap kemunculan politik keluarga tersebut sangatlah erat kaitannya dengan budaya politik yang berkembang di masyarakat. Budaya politik sendiri berkaitan dengan preferensi kekuasaan yang dibangun baik dari segi penerimaan publik maupun pembangunan rezim. Maka pertanyaan yang relevan dalam pembahasan dinasti politik adalah bagaimana karakteristik preferensi budaya politik berkembang dalam pembentukan politik dinasti? Adapun preferensi budaya politik erat kaitannya dengan perilaku memilih yakni kecenderungan memilih untuk memilih berdasarkan sumber informasi yang ditangkap baik itu rasional maupun tradisional.

Aksentuasi budaya politik dalam membahas politik keluarga sebenarnya sudah dilakukan dalam berbagai sudut pandang seperti halnya neopatrimonialisme, klan politik, dan predator politik. Pendekatan neopatrimonialisme sendiri digunakan oleh Haris (2007) dan Zuhro (2010).<sup>28</sup> Menurut perspektif ini, dinasti politik merupakan eksese negatif dari otonomi daerah yang menjadikan demokrasi terbajak (*hijacked democracy*) oleh sirkulasi hubungan inti genealogis, berdasarkan relasi kekeluargaan maupun di luar garis genealogis yang memiliki kepentingan terhadap pelanggaran kekuasaan famili. Hal itulah yang kemudian memicu kalangan kerabat menjadi elit sebagai kata kunci pemahaman dinasti dalam perspektif ini. Politik

---

<sup>28</sup> Ibid, Wasisto Raharjo Djati, dipublikasi Oleh Pusat Kajian Sosiologi Fisip-Ui. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, (Juli 2013): 205

keluarga sebagai elit tunggal diartikan hanya satu kelompok elit yang menguasai jalannya politik dan pemerintahan.

Politik keluarga dalam tipologi elit ini bentuknya prismatic: dinasti politik bertindak sebagai elit memerintah (*governing elite*) yang memiliki hubungan patronase dengan berbagai pihak, utamanya tokoh informal yang memiliki pengaruh sosio-politik maupun sosio-kultural dalam masyarakat (*nongoverning elite*), dan juga masyarakat (*non-elite*). Adapun patronase tersebut diwujudkan dengan cara mengunci pos-pos penting dalam pemerintahan dan masyarakat oleh orang-orang terdekat. Hal ini dilakukan sebagai upaya meredam demonstrasi masyarakat karena sadar bahwa jumlah elit tunggal ini sebenarnya lebih sedikit sehingga cara itu dilakukan untuk mengefektifkan kekuasaan. Sedangkan makna elit pluralis lebih dinamis dibandingkan dengan elit tunggal yang sangat statis. Elit pluralis diartikan sebagai jejaring antar elit dalam konteks berbagi kekuasaan dalam ekonomi dan politik (Haryanto 2007).<sup>29</sup>

Hal yang sama juga terjadi pada tubuh keluarga Kasuba dengan posisi *governing elite* melakukan kendali atas kekuasaan dan hubungan patron dengan pihak-pihak yang memberikan keuntungan dalam proses politik, arus politik ini berdampak pada sentral penting yang menjadi sasaran utama actor politik dalam memberikan posisi aman dengan melakukan pengawasan atas jalannya alur politik yang akan menjaga eksistensi serta mengamankan efektivitas kekuasaan.

---

<sup>29</sup> Ibid, Wasisto Raharjo Djati, dipublikasi Oleh Pusat Kajian Sosiologi Fisip-Ui. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, (Juli 2013): 205

Elit pada dasarnya bersifat jamak dan berganti-ganti pada setiap tahapan fungsional dalam proses pembuatan keputusan dan perannya bisa naik turun tergantung situasinya. Artinya, status elit ini bukanlah suatu keajaiban yang didapatkan dalam hubungan askriptif, namun bisa melekat kepada siapa saja yang kebetulan mempunyai peran penting (Soelaiman 1998).<sup>30</sup>

Sebagai contoh kita mengambil satu fakta politik keluarga yang terjadi di Indonesia pada provinsi Banten, jejak-jejak dinasti politik lebih kentara. Ratu Atut Choisyah Gubernur Banten 2007-2012 misalnya, keluarga besarnya memiliki setidaknya 9 orang yang memimpin di masing masing “kerajaannya”. Seperti dirinya sendiri yang memimpin Banten, suami menjadi anggota DPR, anak menjadi anggota DPD, menantu menjadi anggota DPRD Kota Serang, adik menjadi anggota DPRD Banten, Adik tiri mejadi wakil wali kota Serang, ibu tiri menjadi anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Ibu tirinya yang satu lagi menjadi anggota DPRD kota Serang, dan adik iparnya Airin menjadi Walikota Tangerang Selatan.

Dalam kajian ilmu sosial dan politik, familisme sebagai budaya politik diartikan sebagai ketergantungan yang terlalu besar pada ikatan keluarga, yang melahirkan kebiasaan menempatkan keluarga dan ikatan kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi dari pada kewajiban sosial lainnya. Dalam pengertian lainnya, familisme juga dipahami sebagai new social order, yakni dorongan

---

<sup>30</sup> Ibid, Wasisto Raharjo Djati, dipublikasi Oleh Pusat Kajian Sosiologi Fisip-Ui. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, (Juli 2013): 206

psikologis bagi seseorang untuk dapat berkarir di dalam dua ranah yakni publik sebagai birokrat dan privat sebagai korporat-swasta (Garzon, 2002: 56).<sup>31</sup>

Dalam hal ini, terdapat tiga varian familisme dalam membicarakan dinasti politik dalam konteks ini. *Pertama* adalah familisme (familism), yakni dinasti politik yang didasarkan secara murni pada hubungan darah langsung dalam keluarga (consanguinity) dan hubungan perkawinan (marriage) dengan klan lainnya. Bagi keluarga politik yang lebih lemah posisinya akan menguntungkan pada keluarga politik yang lebih kuat karena akan menjamin eksistensi keluarga politik lemah tersebut (Garzon, 2002: 4). Contoh kasus nyata dinasti politik model familisme ini seperti yang terjadi di Filipina, di mana terdapat 105 dinasti politik baik yang berkembang dalam ranah politik lokal maupun nasional. Hal yang menarik adalah pengaruh kekerabatan tidak hanya berlangsung pada level legislatif maupun eksekutif, tetapi juga merambah ke arena yudikatif maupun aparat penegakan hukum lainnya.

*Kedua* adalah quasi-familisme. Model ini didasarkan pada sikap afeksi dan solidaritas dari anggota keluarga dalam struktur kekuasaan. Adapun afeksi yang dimaksudkan secara harfiah tidak dimaknai sebagai kasih sayang, namun sebagai bentuk orientasi politik keluarga didasarkan pada regionalisme, lingkungan, maupun tribalisme sama dengan keluarga tersebut (Tong-Hee, 2009).

*Ketiga* adalah egoismefamilisme. Model politik ini didasarkan pada pemenuhan aspek fungsionalisme dibanding hanya menuruti garis keturunan maupun

---

<sup>31</sup> Ibid Winda Rosalina Affendi, Jurnal Trias Politika, “*Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten*” (Vol 2. No.2 : Oktober 2018) 237

ikatan darah. Konteks egoisme ini dapat dipahami dalam dua hal, yakni dari segi kepala daerah dan masyarakat. Egoisme dari kepala daerah pada dasarnya sama dengan konsepsi teori sebelumnya yakni kecenderungan mendahulukan keluarga dari pada publik dalam pengisian posisi jabatan publik maupun suksesi pemerintahan (Tong-Hee, 2009: 126).

Dari penjelasan di atas penulis mencoba menjabarkan bagaimana kekuatan politik keluarga kasuba mencoba mempengaruhi, mengontrol dan memberikan kekuasaan penuh terhadap regenerasi kepemimpinan, menjaga elektabilitas serta eksistensi politik di Kabupaten Halmahera Selatan. Hasil analisis dari penulis kemudian akan di jabarkan dan di jelaskan pada bab selanjutnya yakni pada bab hasil penelitian.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif atau dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>32</sup> “Kemudian dipadukan dengan pendekatan penelitian jenis kualitatif”. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan, atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>33</sup>

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan<sup>34</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berkarakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

<sup>33</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 133.

<sup>34</sup>Basrowi dan Suwandi, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 1.

<sup>35</sup>Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 17.

Penulis menerapkan kualitatif karena sifatnya yang menekankan realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Pendekatan kualitatif juga lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan, metode ini juga menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan informan dan metode ini lebih peka dan lebih mudah dalam menyesuaikan diri dengan *setting*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan sasaran penelitiannya masyarakat, mulai dari masyarakat secara umum, seperti siswa/mahasiswa, petani, pedagang maupun masyarakat secara khusus, yaitu hanya salah satu kelompok yang menjadi **Penelitian** sasaran penelitiannya.<sup>36</sup>

### ***B. Lokasi***

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. Alasan penulis memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena sesuai dengan judul proposal skripsi penulis dan merupakan bagian inti dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, sehingga menjadi penting untuk dilakukan penelitian. Selain itu penulis juga sudah mengetahui serta memiliki akses mudah untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut, karna tempat penelitian ini juga merupakan tempat kelahiran penulis.

---

<sup>36</sup>Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 55.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data di dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan, sebagai pengamat penuh yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi.

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Peneliti melakukan penelitian di beberapa tokoh politik dari keluarga kasuba dan beberapa masyarakat Halmahera selatan untuk mengetahui bagaimana “Pengaruh Politik Dinasti Keluarga Kasuba Dalam Pergulatan politik di Kabupaten Halmahera Selatan”. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai informasi judul penelitian dan juga fakta yang terjadi di lapangan tentang “Pengaruh Politik Dinasti Keluarga Kasuba”.

### ***D. Data dan Sumber Data***

Data dan sumber data merupakan faktor penentu dalam keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, apabila tidak adanya data dan sumber data yang terpercaya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.<sup>37</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah keluarga kasuba dan beberapa masyarakat yang peneliti jadikan sumber informasi valid.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang dapat memperkuat data pokok. Dalam proposal skripsi ini yang dijadikan sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.

***E. Teknik Pengumpulan Data***

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka perlu adanya teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dan pengamatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul “metode research penelitian ilmiah” S. Nasution

---

<sup>37</sup>Joko P Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta:Rineka Cipta,1997), 85.

berpendapat, “observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan.<sup>38</sup> Sedangkan menurut sukardi, observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan salah satu panca indera yaitu indera penglihatan sebagai alat bantu utamanya untuk melakukan pengamatan langsung, selain panca indera biasanya penulis menggunakan alat bantu lain sesuai dengan kondisi lapangan antara lain buku catatan, kamera, dan sebagainya.<sup>39</sup>

Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, yakni mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti dan dibarengi dengan kegiatan pencatatan sistematis berkaitan dengan apa yang dilihat dan berkenaan dengan data yang dibutuhkan.

## 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan melalui para tokoh atau informan. Pada tahap ini materi wawancara bersifat umum. Pada tahap berikutnya wawancara akan lebih diarahkan pada fokus penelitian dan langsung menghubungi sumber-sumber yang berhubungan langsung (*first hand*). Kemudian data hasil wawancara, dikomparasikan dengan studi observasi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kedua teknik tersebut yang dilakukan dalam waktu terpisah atau tidak bersamaan sehingga diharapkan penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dalam menjalin atau memperoleh data-

---

<sup>38</sup>N. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Cet; VII, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 106.

<sup>39</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 78.

data yang diperlukan dan dianggap sesuai dengan rencana awal penelitian. adapun sumber data melalui wawancara ini adalah keluarga kasuba dan beberapa Masyarakat Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Setelah sejumlah data dan keterangan berhasil dikumpul, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut dengan beberapa teknik. Karena penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif, maka cara yang digunakan sebagai berikut:

##### **1. Reduksi data**

Yaitu penulis menganalisis dengan cara memilih serta menentukan data dengan keterangan yang dianggap relevan dengan pembahasan ini. Data yang dirangkum sedemikian rupa sehingga dapat ditentukan data dan keterangan yang masuk dalam kategori pembahasan skripsi ini.

##### **2. Pengkajian data**

Yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Penyajian data yang di sampaikan secara kualitatif atau dalam bentuk kalimat, sehingga menjadi suatu paragraf yang utuh.

##### **a. Verifikasi data**

Yaitu pengambilan kesimpulan dengan cara menyimpulkan data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar akurat.

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Data yang telah terkumpul dan teranalisis perlu dicek kembali keabsahannya sehingga tidak salah pengertian terhadap data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi, yaitu metode pengecekan data terhadap sumber data dengan mengecek kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan karakteristik sumber data yang telah ditentukan penulis, kesesuaian metode penelitian yang digunakan, serta kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.

Perpanjangan keikutsertaan sebagai peneliti yang berguna untuk peningkatan validitas data yang dikumpulkan. Penulis akan mengalokasikan waktu selama beberapa minggu untuk meneliti secara langsung mengenai Pengaruh Politik Dinasti Keluarga Kasuba dalam Pergulatan Politik di Kabupaten Halmahera Selatan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### *A. Gambaran Umum kabupaten Halmahera Selatan dan Silsilah Keluarga Kasuba*

Berbicara tentang gambaran umum terkait kondisi daerah di halmahera selatan tidak terlepas dari proses dan sejarah berdirinya, keadaan masyarakat, adat istiadat, kebiasaan dan tradisi yang dianut, mata pencaharian serta perkembangan masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan hasil penelitian peneliti di kabupaten Halmahera Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### *1. Sejarah terbentuknya kabupaten Halmahera selatan*

Kabupaten Halmahera Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Labuha. Sebagian besar wilayah Halmahera Selatan merupakan perairan, dengan luas sebesar 31.484,40 km<sup>2</sup> atau mencapai 78 persen dari total luas Kabupaten Halmahera Selatan yang mencapai 40.263,72 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 228.771 jiwa (2019).

Secara astronomis, Kabupaten Halmahera Selatan terletak antara 126045' - 129030' BT (Bujur Timur) dan antara 0030' LU (Lintang Utara) dan 2000' LS (lintang Selatan). Secara geografis, Kabupaten Halmahera Selatan berbatasan langsung dengan Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Tengah di sebelah utara. Sementara untuk di sebelah timur, selatan dan barat, Kabupaten

Halmahera Selatan berbatasan dengan wilayah perairan, yaitu Laut Halmahera di sebelah Timur, Laut Banda di sebelah selatan, dan Laut Maluku di sebelah barat.

Luas wilayah daratan Kabupaten Halmahera Selatan 8.779,32 km<sup>2</sup>. Luas daratan Kabupaten Halmahera Selatan hanya 22 persen dari total luas wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yaitu 40.263,72 km<sup>2</sup>. Kabupaten Halmahera Selatan terletak di kawasan timur Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Terdapat 6 pulau besar yaitu Pulau Obi, Pulau Bacan, Pulau Makian, Pulau Kayoa, Pulau Kasiruta, dan Pulau Mandioli. Dua pulau terluas yaitu Pulau Obi yang luasnya sebesar 3.111 km<sup>2</sup> dan Pulau Bacan sebesar 2053 km<sup>2</sup>. Selain itu, Kabupaten Halmahera Selatan juga terdiri dari pulau-pulau kecil lainnya, serta daratan Pulau Halmahera yang berbatasan dengan kabupaten Halmahera Tengah.

Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari 30 kecamatan. Ibukota Kabupaten Halmahera Selatan adalah Kecamatan Bacan yang terdapat di Pulau Bacan. Kecamatan yang memiliki jarak terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Gane Timur yaitu berjarak 272,6 km dari Kecamatan Bacan. Dilihat dari ketinggian wilayahnya, sebagian besar penduduk Kabupaten Halmahera Selatan tinggal di pesisir pantai pada ketinggian satu hingga tujuh meter di atas permukaan laut (mpdl). Kecamatan dengan ketinggian wilayah tujuh mdpl yaitu Kecamatan Bacan Timur dan Kecamatan Kayoa. Kecamatan yang terluas yaitu Kecamatan Obi Selatan sebesar 12,34 persen dari total luas seluruh kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan kecamatan yang terkecil yaitu Kecamatan Kayoa Selatan sebesar 0,30

persen. Secara administratif, wilayah Kabupaten Halmahera Selatan mencakup 250 desa definitif serta ada enam Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).

Kabupaten Halmahera Selatan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Utara atau saat ini menjadi Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 2003 tentang pemekaran wilayah Kabupaten Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Selatan pada awal pembentukannya memiliki 9 kecamatan namun kini menjadi 30 kecamatan. Sebagaimana terdapat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel I**  
**Data Jumlah desa Di Kabupaten Halmahera Selatan**

No	Kode Wilayah	Nama Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Desa
1.	82.04.01	Pulau Makian	Kota	15
2.	82.04.02	Kayoa	Guruapin	14
3.	82.04.03	Gane timur	Mafa	12
4.	82.04.04	Gane barat	Saketa	10
5.	82.04.05	Obi selatan	Wayaloar	8
6.	82.04.06	Obi	Laiwui	9
7.	82.04.07	Bacan timur	Babang	10
8.	82.04.08	Bacan	Labuha	14
9.	82.04.09	Bacan barat	Indari	7
10.	82.04.10	Makian barat	Mateketen	7
11.	82.04.11	Kayoa barat	Busua	4
12.	82.04.12	Kayoa selatan	Laluin	6
13.	82.04.13	Kayoa utara	Laromabati	6
14.	82.04.14	Bacan barat utara	Yaba	8
15.	82.04.15	Kasiruta barat	Palamea	10
16.	82.04.16	Kasiruta timur	Loleo jaya	8
17.	82.04.17	Bacan selatan	Mandaong	10
18.	82.04.18	Batanglomang	Bajo	8
19.	82.04.19	Mandioli selatan	Jiko	6
20.	82.04.20	Mandioli utara	Indong	6
21.	82.04.21	Bacan timur selatan	Wayaua	7

22.	82.04.22	Bacan timur tengah	Bibinoi	7
23.	82.04.23	Gane barat selatan	Gane dalam	8
24.	82.04.24	Gane barat utara	Dolik	12
25.	82.04.25	Kepulauan joronga	Kakupang	7
26.	82.04.26	Gane timur selatan	Gane luar	5
27.	82.04.27	Gane timur tengah	Bisui	8
28.	82.04.28	Obi barat	Jikohai	6
29.	82.04.29	Obi timur	Sum	4
30.	82.04.30	Obi utara	Madopolo	7

***Sumber data : Arsip Pemerintah Kab Halmahera Selatan Tahun 2019***

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sampai dengan saat ini jumlah desa di kabupaten Halmahera Selatan berjumlah **249 Desa** dengan jumlah **30 Kecamatan**.

Adapun adat Istiadat yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan yang jumpai sekarang ini misalnya Popas Lipu artinya Keliling Kampung. Sebua ritual yang dimaksudkan untuk melakukan napak tilas terhadap peristiwa terbentuknya Ibu Kota Kerajaan Bacan. Selain itu, ritual ini juga dilakukan untuk memberikan perlindungan atau mensucikan kawasan Lipu (Ibu Kota Kerajaan Bacan) di desa Amasing dari wabah penyakit, musiba, malapetaka. Mereka membacakan doa dan berkeliling kampung dengan melewati kawasan tertentu yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Popas Lipu (Keliling Kampung) tidak hanya melibatkan para tetua adat kesultanan Bacan tetapi juga melibatkan masyarakat adat, paguyuban, organisasi kemasyarakatan, kepemduaan, serta masyarakat umum. Meskipun demikian, paling berperan penting dalam ritual ini adalah tetua adat, Imam Masjid dan pihak masyarakat adat di kesultanan. Popas Lipu digelar di daerah Bacan

Kabupaten Halmahera Selatan. Pusat pelaksanaannya yaitu di daerah Amasing dengan dan mengelilingi kampung lain disekitarnya.

Kegiatan ini diawali do'a bersama di mesjid Kesultanan Bacan, lalu dilakukan dengan berkeliling kampung. Dalam kegiatan ini terdapat istilah empat pintu. Empat pintu merupakan istilah untuk menunjukkan bagian Barat, Timur, Selatan dan Utara. Dalam memulai ritualnya para tokoh atau Tetua Adat akan memulai ritualnya dengan berjalan menuju arah Barat, selanjutnya menujuk ke timur, lalu ke Utara dan diakhiri di arah Selatan. Ritual ini dilakukan untuk mengenang atau napak tilas terhadap peristiwa terbentuknya Ibu Kota Kesultanan Bacan dan mensucikan kampung dari wabah penyakit dan menghindarkan diri dari bencana. Tetapi dalam perkembangannya, Popas Lipu diperingati setiap tahun untuk memperingati tahun baru Islam, yang jatuh pada tanggal 1 Muharram, setiap tahun berjalan.

Popas Lipu sebagaimana tujuan pegelarannya dimaksudkan untuk mengenang terbentuknya Ibu Kota Kesultanan, mensucikan kampung dari wabah penyakit, dan memanjatkan doa untuk menghindarkan diri dari bencana, memiliki sejumlah fungsi sosial. Diantara fungsi sosial dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Budaya rasa syukur dan selalu memanjatkan melalui doa-doa kehadiran Allah SWT, merupakan nilai sosial-religius yang terpatri dalam ritual Popas Lipu. Pembacaan doa-doa, bertwassul menunjukkan bagaimana rakyat atau masyarakat dibelajarkan konsep bersyukur secara hakiki agar

dalam menghadapi rintangan hidup ini selalu mengedepankan prasangka yang baik.

2. Ritual Popas Lipu memiliki nilai kearifan budaya di mana setiap pemimpin tertinggi diwajibkan selalu melihat rakyatnya secara dekat. Berkeliling kampung bermakna melakukan kunjungan dan sekaligus mengamati secara mendalam tentang kondisi masyarakat dan memastikan apa yang dialami oleh masyarakat.
3. Pelibatan warga dalam kegiatan ritual ini adalah ruh dari bangunan dasar memperkuat tali persatuan dan kesatuan serta memelihara kerukunan dan keakraban warga. Peraduan antara keduanya (nilai religious dan sosial) adalah contoh konkret bahwa kekuatan sumberdaya persatuan hanya dapat dikokohkan dengan menyatukan semua elemen masyarakat untuk memiliki konsep hidup bersama. Hal inilah yang dijaga dan dikembangkan dalam ritual Popas Lipu.
4. Memanjatkan doa untuk agar kampung tidak tercemar wabah penyakit dan menghindarkan diri dari mara bahaya, memiliki nilai sosial tentang sikap perlindungan terhadap rakyat dari seorang pemimpin yang bijaksana. Bagaimana pun alasannya, proteksi warga dari bahaya ialah

sikap teladan yang patut dicontohi agar hubungan harmonis antara warga dan pemimpinnya terjaga dan terjalin dengan baik.<sup>40</sup>

Dan masih banyak lagi adat istiadat, budaya serta tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat kabupaten Halmahera Selatan yang tercantum dalam tulisan ini seperti kakarongan (tarian togal), Tarian Gala, Cakalele (tarian Perang), sambut mohoka (adat penyambutan pengantin).

Mayoritas Masyarakat di kabupaten Halmahera Selatan juga memiliki beberapa macam mata pencarian diantaranya sebagai Buruh tani Kopra, Cengkeh, Cacao, Pala, Buruh Nelayan, Buruh, Pegawai, Wirasuasta/Pedagang.<sup>41</sup>

## ***2. Silsilah keluarga kasuba***

Silsilah merupakan garis keturunan seseorang, khususnya bagi masyarakat timur. Silsilah merupakan garis keturunan yang menggambarkan asal usul seseorang dan hubungannya dengan keluarga dalam beberapa generasi. Adanya silsilah dipengaruhi oleh terjadinya perkawinan antara dua orang laki-laki dan perempuan dan kemudian memiliki keturunan. Dalam bidang linguistik atau ilmu bahasa merupakan keturunan keluarga bahasa yang di mulai dari induk dan diikuti dari bahasa-bahasa keturunannya.

---

<sup>40</sup> <https://Warisanbudaya.Kemdikbud.Go.Id/?Newdetail&Detailtetap=1667>. Diakses Pada Taggal 07 Juli 2022

<sup>41</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan

Berikut peneliti akan mengurai silsilah atau garis keturunan keluarga kasuba. Berdasarkan dari beberapa sumber sejarah serta catatan yang diperoleh dari keluarga, anak, sahabat yang memiliki kedekatan secara kekerabatan.

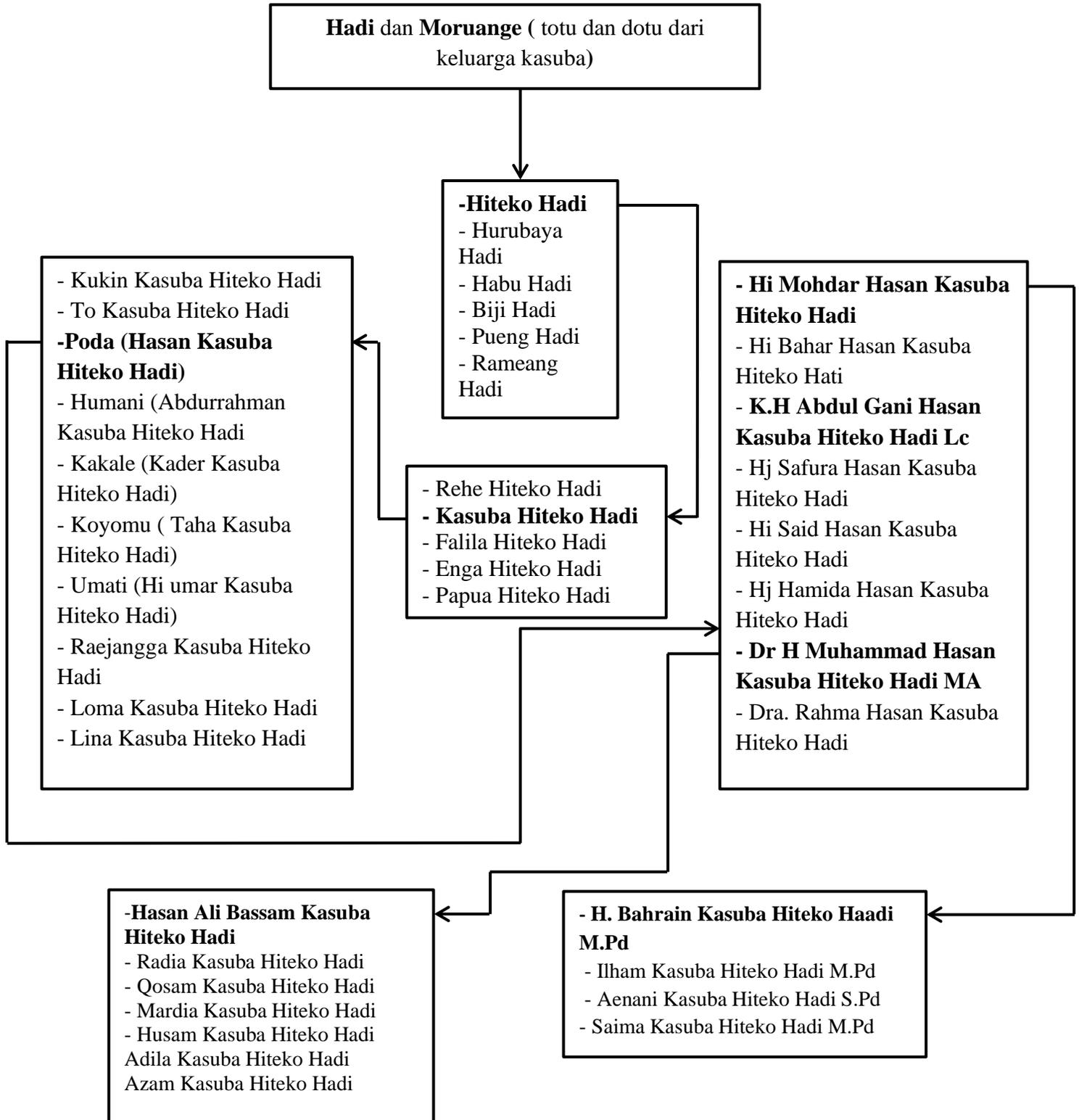
inilah anak-anak **Hadi** dan **Moruange** ( totu dan dotu dari keluarga kasuba) mereka terdiri dari enam bersaudara, dua orang perempuan dan dua orang laki-laki, kemudian keturunan dari **Hiteko Hadi** Istrinya **Parito** yang berasal dari desa wayaua, Mempunyai anak yaitu **Kasuba Hiteko Hadi** dengan beberapa saudaranya.

Perlu diketahui juga, bahwa sesungguhnya istri kasuba ini keturunan dari sultan (raja Banggai) yang diculik moyang kita dulu. Kemudian dibawa ke obi sunda, dalam kondisi hamil. Kemudian beliau melahirkan satu anak laki-laki diberi nama (Dago Kino) anak laki-laki inilah kemudian besar sampai dewasa dan menikah mempunyai keturunan semuanya laki-laki kecuali satu perempuan diberi nama (fiola). Kemudian oleh kasuba dijadikan istri dan mempunyai anak yang bernama **Poda (Hasan Hiteko Hadi)**.

**Poda (Hasan Hiteko Hadi)** lalu menikah dengan **Loseng (Nurul) Daud Karapusa Budo** dan lahirlah anaknya yang bernama **Hi Mohdar Hasan Kasuba Hiteko Hadi** dan memiliki saudara antara lain **K.H Abdul Gani Hasan Kasuba Hiteko Hadi Lc (Gubernur Maluku Utara)** dan **Dr H Muhammad Hasan Kasuba Hiteko Hadi MA (Bupati Halmahera Selatan)**.

Sebagaimana yang digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

### Silsilah keturunan Kasuba



Demikianlah silsilah (keturunan) dari keluarga kasuba yang di mulai dari **Hadi dan Maruange** (Sebagai Totu Dotu dari keturunan Kasuba) sampai pada anak cucu yang merupakan actor politik lokal di Kabupaten Halmahera Selatan.<sup>42</sup>

### ***B. Pengaruh Polirik Keluarga Dalam Demokrasi Indonesia***

Secara harfiah, politik keluarga dapat dipahami sebagai strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaan, memberikan dukungan serta mengawasi proses politik transisi keluarga dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah digenggam kepada orang lain yang masih merupakan kalangan sanak keluarga.<sup>43</sup>

Adapun berbagai gejala yang mendasari terbentuknya suatu politik kekeluargaan dapat dianalisis dari dua hal. *Pertama*, macetnya kaderisasi partai politik dalam menjaring calon kepala daerah yang berkualitas, sehingga menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan sanak keluarga kepala daerah untuk menjadi pejabat publik. *Kedua*, konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi status quo di daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan petahana. Kedua gejala umum tersebut menimbulkan adanya sikap pro dan kontra dalam pemahaman politik tersebut. Sikap pro dan kontra kemudian berkembang menjadi perdebatan diskursus dalam revisi RUU Pilkada.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Marwan Polisiri, *Sang Pendakwah Kiyai Haji Abdul Gani Kasuba, Lc. "Sebuah Manifestasi Jejak Kepemimpinan Kharismatik Maluku Utara*. (Penerbit Merah Putih, 2019).

<sup>43</sup> Wasisto Raharjo Djati, Pusat Kajian Sosiologi Fisip-Ui. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, (Juli 2013): 204

<sup>44</sup> Ibid

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Muhammad Risal (masyarakat sekaligus pengamat politik di Halmahera selatan) menerangkan bahwa :

”Politik yang terjadi di Halmahera selatan tidak terlepas dari kondisi adat,budaya serta kultur yang dipegang teguh oleh masyarakat, hal ini merupakan egosentris masing-masing masyarakat yang ingin mempertahankan kekuasaan kelompoknya, dengan melihat latar belakang suku atau keluarga, sehingga kontestasi politik yang terjadi di Halmahera selatan selama 4 dekade ini di dominasi oleh politik keluarga”.<sup>45</sup>

Dari penjelasan dan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa realitas yang terjadi di di lapangan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wasito Raharjo terkait dengan menjaga status quo yakni mempertahankan kekuasaan kelompok atau keluarga. Peneliti juga menyimpulkan bahwa macetnya kaderisasi yang terjadi dalam pemilihan kandidat politik yang terdapat dalam teori diatas juga tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, justru sebaliknya kekuatan sosio politik dari kader partai dalam hal ini actor politik kasubalah yang membuat elektabilitas partai menjadi naik dan mempengaruhi eksistensi partai dalam roda organisasi, serta memiliki potensi besar yang menguntungkan partai politik di dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan peningkatan bagi kaderisasi di tubuh partai politik.

Para actor politik atau elit kelompok mendasari terjadinya gelombang politik keluarga yang kuat sama halnya yang di kemukakan oleh Pareto dalam Varma (2007 : 206) menurutnya yang disebut dengan kelompok elit adalah sekelompok kecil

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan bapak *Muhammad rizal (pengamat politik di Halmahera selatan)*, 6 mei 2022

individu yang memiliki kualitas-kualitas terbaik, yang dapat menjangkau pusat kekuasaan sosial politik.<sup>46</sup>

Pareto meyakini bahwa elit yang tersebar pada sektor pekerjaan yang berbeda itu umumnya berasal dari kelas yang sama. Yakni orang-orang yang kaya dan pandai. Ia menggolongkan masyarakat kedalam dua kelas, lapisan atas (elite) dan lapisan bawah (non-elite). Lapisan atas atau kelas elit terbagi dalam dua kelompok, yakni elit yang memerintah (governing elite) dan elit yang tidak memerintah (non-governing elite). Sementara Gaetano Mosca menyebutkan bahwa di setiap masyarakat yang berbentuk apapun senantiasa muncul dua kelas, yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah memiliki jumlah yang sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan, yang kadang-kadang bersifat legal, arbitrer, dan menggunakan kekerasan.

Keyakinan yang di sampaikan Pareto mendekati realitas proses politik yang terjadi di tubuh keluarga Kasuba, actor politik Kasuba mengambil posisi menguntungkan yang tersebar pada sector pekerjaan dan track record yang mampu memberikan posisi strategis pada kubu kasuba, sama halnya dengan pembagian kelas yang di kemukakan oleh pareto, bahwa kelas atas (elit) menduduki kursi kekuasaan dengan di kendalikannya pelaksanaan kekuasaan sesuai dngan legalitas yang di miliki, actor Kasuba menggunakan kelas elit ini dalam melaksanakan kekuasaan yang

---

<sup>46</sup> Winda Rosalina Affendi, Jurnal Trias Politika, “*Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten*” (Vol 2. No.2 : Oktober 2018) 233 - 247

terpusat pada jabatan pemerintah di tambah dengan sector pendukung membuat jalan politik yang di lakukan oleh actor Kasuba mendapat peluang pada sosio-politik dan sosio-kultural di masyarakat.

Politik dalam tipologi elit ini bentuknya prismatic: Politik keluarga bertindak sebagai elit memerintah (governing elite) yang memiliki hubungan patronase dengan berbagai pihak, utamanya tokoh informal yang memiliki pengaruh sosio-politik maupun sosio-kultural dalam masyarakat (nongoverning elite), dan juga masyarakat (non-elite). Adapun patronase tersebut diwujudkan dengan cara mengunci pos-pos penting dalam pemerintahan dan masyarakat oleh orang-orang terdekat. Hal ini dilakukan sebagai upaya meredam demonstrasi masyarakat karena sadar bahwa jumlah elit tunggal ini sebenarnya lebih sedikit sehingga cara itu dilakukan untuk mengefektifkan kekuasaan. Sedangkan makna elit pluralis lebih dinamis dibandingkan dengan elit tunggal yang sangat statis. Elit pluralis diartikan sebagai jejaring antar elit dalam konteks berbagi kekuasaan dalam ekonomi dan politik (Haryanto 2007).<sup>47</sup>

Hal yang sama juga terjadi pada tubuh keluarga Kasuba dengan posisi governing elite melakukan kendali atas kekuasaan dan hubungan patron dengan pihak-pihak yang memberikan keuntungan dalam proses politik, arus politik ini berdampak pada sentral penting yang menjadi sasaran utama actor politik dalam

---

<sup>47</sup> Ibid, Wasisto Raharjo Djati, dipublikasi Oleh Pusat Kajian Sosiologi Fisip-Ui. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, (Juli 2013): 205

memberikan posisi aman dengan melakukan pengawasan atas jalannya alur politik yang akan menjaga eksistensi serta mengamankan efektivitas kekuasaan.

Elit pada dasarnya bersifat jamak dan berganti-ganti pada setiap tahapan fungsional dalam proses pembuatan keputusan dan perannya bisa naik turun tergantung situasinya. Artinya, status elit ini bukanlah suatu keajaiban yang didapatkan dalam hubungan askriptif, namun bisa melekat kepada siapa saja yang kebetulan mempunyai peran penting (Soelaiman 1998).<sup>48</sup>

Sebagai contoh kita mengambil satu fakta politik keluarga yang terjadi di Indonesia pada provinsi Banten, jejak-jejak politik keluarga lebih kentara. Ratu Atut Choisyah Gubernur Banten 2007-2012 misalnya, keluarga besarnya memiliki setidaknya 9 orang yang memimpin di masing masing “kerajaannya”. Seperti dirinya sendiri yang memimpin Banten, suami menjadi anggota DPR, anak menjadi anggota DPD, menantu menjadi anggota DPRD Kota Serang, adik menjadi anggota DPRD Banten, Adik tiri mejadi wakil wali kota Serang, ibu tiri menjadi anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Ibu tirinya yang satu lagi menjadi anggota DPRD kota Serang, dan adik iparnya Airin menjadi Walikota Tangerang Selatan.

Dalam kajian ilmu sosial dan politik, familisme sebagai budaya politik diartikan sebagai ketergantungan yang terlalu besar pada ikatan keluarga, yang melahirkan kebiasaan menempatkan keluarga dan ikatan kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi dari pada kewajiban sosial lainnya. Dalam pengertian

---

<sup>48</sup> Ibid, Wasisto Raharjo Djati, dipublikasi Oleh Pusat Kajian Sosiologi Fisip-Ui. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, (Juli 2013): 206

lainnya, familisme juga dipahami sebagai new social order, yakni dorongan psikologis bagi seseorang untuk dapat berkarir di dalam dua ranah yakni publik sebagai birokrat dan privat sebagai korporat-swasta (Garzon, 2002: 56).<sup>49</sup>

Dalam hal ini, terdapat tiga varian familisme dalam membicarakan politik keluarga dalam konteks ini.

1. adalah familisme (familism), yakni politik yang didasarkan secara murni pada hubungan darah langsung dalam keluarga (consanguinity) dan hubungan perkawinan (marriage) dengan klan lainnya. Bagi keluarga politik yang lebih lemah posisinya akan menguntungkan pada keluarga politik yang lebih kuat karena akan menjamin eksistensi keluarga politik lemah tersebut (Garzon, 2002: 4). Contoh kasus nyata politik model familisme ini seperti yang terjadi di Filipina, di mana terdapat 105 dinasti politik baik yang berkembang dalam ranah politik lokal maupun nasional. Hal yang menarik adalah pengaruh kekerabatan tidak hanya berlangsung pada level legislatif maupun eksekutif, tetapi juga merambah ke arena yudikatif maupun aparat penegakan hukum lainnya
2. Adalah quasi-familisme. Model ini didasarkan pada sikap afeksi dan solidaritas dari anggota keluarga dalam struktur kekuasaan. Adapun afeksi yang dimaksudkan secara harfiah tidak dimaknai sebagai kasih sayang, namun sebagai bentuk orientasi politik keluarga didasarkan pada regionalisme,

---

<sup>49</sup> Ibid Winda Rosalina Affendi, Jurnal Trias Politika, “*Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten*” (Vol 2. No.2 : Oktober 2018) 237

lingkungan, maupun tribalisme sama dengan keluarga tersebut (Tong-Hee, 2009).

3. Adalah egoismefamilisme. Model Politik ini didasarkan pada pemenuhan aspek fungsionalisme dibanding hanya menuruti garis keturunan maupun ikatan darah. Konteks egoisme ini dapat dipahami dalam dua hal, yakni dari segi kepala daerah dan masyarakat. Egoisme dari kepala daerah pada dasarnya sama dengan konsepsi teori sebelumnya yakni kecenderungan mendahulukan keluarga dari pada publik dalam pengisian posisi jabatan publik maupun suksesi pemerintahan (Tong-Hee, 2009: 126).

Dari penjelasan diatas peneliti mencoba menjabarkan bagaimana kekuatan politik keluarga kasuba mencoba mempengaruhi, mengontrol dan memberikan kekuasaan penuh terhadap regenerasi kepemimpinan, menjaga elektabilitas serta eksistensi politik di Kabupaten Halmahera Selatan. Hasil analisis dari peneliti kemudian akan di jabarkan dan dijelaskan pada poin berikut.

### ***C. Pengaruh Politik Keluarga Kasuba Dalam Pergulatan Politik Di Kabupaten Halmahera Selatan***

Pengaruh Politik keluarga kasuba di mulai ketika actor politik daerah yang sangat dikenal bernama Abdul Gani Kasuba dan Muhamad Kasuba bergabung dalam konstestasi politik daerah di Maluku utara, tepatnya di kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini terjadi karna kedua tokoh tersebut memiliki pengaruh besar disaat terjadinya pemekaran provinsi Maluku utara pada tahun 1999, mengakibatkan pembaharuan kekuasaan dan pengaruh yang terjadi di beberapa kabupaten di Maluku utara, salah

satunya adalah kabupaten Halmahera Selatan. Dengan berada pada posisi desentralisasi kekuasaan di provinsi Maluku utara waktu itu, sehingga melahirkan kesempatan yang besar bagi dua tokoh tersebut dalam mempengaruhi posisi sentral politik yang ada di Halmahera selatan.

Salah satu pengaruh yang cukup besar terhadap kedua tokoh itu adalah posisi sebagai bagian dari tokoh agama yang sangat kental melekat pada tubuh KH Abdul Gani Kasuba dan Dr. Muhammad Kasuba, membuat masyarakat sangat mengenal mereka dan mengetahui peran penting kedua tokoh tersebut. Abdul gani kasuba dan Muhammad kasuba juga merupakan tokoh agama yang menjadi bagian dari tokoh perdamaian atas terjadinya tragedi kerusuhan Maluku pada era 90 an, yang membuat peran tokoh agama sangat dibutuhkan masyarakat waktu itu sebagai senjata perdamaian umat islam di Maluku utara ( Halmahera selatan) Pengalaman Abdul Gani Kasuba sekian puluhan tahun berkumpul dengan masyarakat, beliau merasakan adanya persaudaraan antar saudara dan suku-suku yang ada di Maluku..

Beliau adalah salah satu dari suku Tobelo di mana keluarga pertama menganut agama Islam dan menjadi orang Islam Tobelo pertama kali yang bisa menikmati pendidikan Islam sampai tingkat tinggi di luar negeri.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid Siti Alfia Nur Alfia Abdullah, *Dakwah Abdul Gani Kasuba Dalam Membangun Damai Di Maluku Utara Tahun 1999-2000* Islamic Communication Journal Volume 5, Nomor 1, (Januari-Juni 2020) : 109

Sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Hanafi Ali selaku tokoh Masyarakat Desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan beliau mengatakan:

“Bahwa faktor yang berpengaruh dalam perjalan atau karir politik Keluarag Kasuba yaitu dilihat dari beberapa segi diantaranya adalah segi Agama dan suku. Dari segi agama beliau sangat berperan penting sebagai tokoh agama karna latar belakang beliau sebagai seorang sarjana luar negri, dengan kondisi pendidikan pada saat itu yang bisa dibilang sangat susah seseorang dari wilayah terpencil untuk bisa melanjutkan study di madinah. Juga dilihat dari pengabdian beliau terhadap masyarakat dibidang dakwah yang salah satunya beliau membangun alkhairaat di Maluku utara sebagai seorang pendidik dan salah satu momentum yang paling dikenal dan diingat oleh masyarakat Maluku utara adalah perjuangan beliau dalam mendamaikan kerusakan atau konflik agama yang terjadi di Maluku. Kemudian dari segi suku, beliau termasuk memiliki suku yang cukup besar yaitu suku tobelo gaklela (Togale) di Maluku utara khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan. Sehingga atas dasar itulah beliau sangat berpengaruh sehingga membuat masyarakat mendukungnya sebagai seorang politikus terkenal di Maluku utara”.<sup>51</sup>

Tokoh agama termasuk kekuatan politik dalam system politik, yaitu kita bisa melihat dalam struktur politik. Dilihat dari tugas dan fungsi dari tokoh agama, bisa dikatakan sebagai pemimpin, kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut, Soejono Soekanto (2000;318) menurutnya kepemimpinan dibagi atas 2 bagian yaitu :

1. Kepemimpinan yang bersifat resmi (formal leader) yaitu kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan.
2. Kepemimpinan karena pengakuan masyarakat akan kemampuan seseorang

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Hanafi Ali Selaku *Tokoh Masyarakat Desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan* 11 mei 2022

untuk menjalankan kepemimpinan (informal leadership).<sup>52</sup>

Kedua contoh kepemimpinan di atas maka kita bisa melihat tokoh agama termasuk pada informal leadership. Kepemimpinan ini mempunyai ruang lingkup yang tanpa batas-batas resmi, karena kepemimpinan demikian didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Peranan dan fungsi dari tokoh agama sangat penting dalam mengendalikan ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat dalam iklim yang semakindemokrasi ini. Tokoh agama berperan sangat penting dalam menciptakan atau membentuk opini publik atau pendapat umum yang sehat. Oleh karena itu isu-isu yang menyesatkan dan kabar bohong yang tersebar bisa ditangkal masyarakat bila selalu berada dibawah bimbingan tokoh agama. Tokoh agama atau pemimpin adalah orang yang menjadi pemimpin dalam suatu agama, seperti : para kiyai, ulama, pendeta, pastor dan lain-lain. Keberadaan tokoh agama di masyarakat seringkali lebih di dengar perkataan-perkataannya dari pada pemimpin-pemimpin yang lain.

Penjelasan diatas Sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak ahmat hj usman selaku pengamat politik Kabupaten Halmahera Selatan mengatakan:

“Terbukti bahwa tokoh agama sangat berpengaruh di mata msyarakat karna dijadikan sebagai teladaan dan juga sangat didengar, itu terlihat pada

---

<sup>52</sup> Siti Alfia Nur Alfia Abdullah, *Dakwah Abdul Gani Kasuba Dalam Membangun Damai Di Maluku Utara Tahun 1999-2000* Islamic Communication Journal Volume 5, Nomor 1, (Januari-Juni 2020) : 109

kepemimpinan kasuba yang merupakan tokoh agama juga sebagai tokoh politik di Maluku utara khususnya Halmahera Selatan”<sup>53</sup>

Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa salah satu indikator yang menunjang karir dan juga peluang besar bagi actor politik di Kabupaten Halmahera Selatan adalah ketokohan agama, karna hal itu merupakan instrument penting yang sudah menjadi alasan dan kebiasaan masyarakat untuk memberikan dukungan serta kepercayaan penuh kepada seseorang yang terjun ke dalam dunia politik di Kabupaten Halmahera Selatan.

Gerakan dakwah yang dilakukan oleh Abdul Ghani Kasuba untuk menegakkan hak-hak umat Islam di satu sisi tetap menghargai dan melindungi kaum agama lain (Kristen) untuk hidup di wilayah yang dipimpinnya. Abdul Gani Kasuba berhasil menunjukkan sebuah jihad yang berdasarkan perlakuan tidak baik kepada umat Islam, namun dibalas dengan tindakan yang objektif dikarenakan pihak umat Kristen yang melakukannya terlebih dahulu, barulah umat Islam dikerahkan untuk melawan tetapi dengan yang baik dengan pengerahan segala kemampuan untuk melepaskan diri dari segala hal yang menghambat pendekatan diri terhadap Allah, baik hambatan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Hambatan internal muncul dari jiwa (nafsu) yang mendorong untuk berbuat keburukan sesuai dengan watak nafsu, hawa nafsu yang tidak terkendali, dan kecintaan terhadap dunia. Sedang hambatan eksternal berupa syetan yang merupakan musuh besar umat

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Hi Usman Selaku *pengamat politik Kabupaten Halmahera Selatan* 9 Mei 2022

manusia (yang beriman), orang-orang kafir, munafik, dan para pelaku maksiat dan kemungkar.<sup>54</sup>

Sedangkan Muhammad kasuba merupakan tokoh agama yang sangat di kenal di penjuru kabupaten Halmahera selatan, beliau yang merupakan Lulusan cumlode doktor ilmu pemerintahan ini, diakui sebagai sosok pemimpin yang berintegritas dan berkarakter Pembawaannya yang santun, religius, respek tanpa mengenal status kaya atau miskin, penyantun dan penyayang kaum papa tetapi memiliki kepemimpinan yang tegas disiplin visioner dan pro rakyat membuatnya punya tempat tersendiri dimata masyarakat Halmahera selatan. Beliau mulai berkecimpun pada dunia politik pertama kali pada tahun 2002 sebagai anggot PDRD Kabupaten.

Pengaruh beliau juga menjadi salah satu kekuatan besar dalam arus politik di Halmahera selatan, inilah awal mula jalan kasuba dalam berkecimpun didunia Politik local, pada decade 1999 sampe sekarang. Kondisi politik di Halmahera selatan juga bisa dibbilang sangat kental dengan nuansa suku, sehingga potensi akctor politik kasuba dalam konstestasi politik di halsel mampu memobilisasi suku tobelo galela yang merupakan salah satu suku terbesar di provins Maluku Utara. Mengingat keluarga kasuba adalah suku dari tobelo sehingga nuansa poilitik dengan melibatkan suku atau kekeluargaan dalam massa pendukung menjadi kuat dan besar.

Berikut daftar Masa kepemimpinan politik yang di pegang oleh keluarga kasuba yang ada pada tabel dibawah ini :

---

<sup>54</sup> Siti Alfia Nur Alfia Abdullah, *Dakwah Abdul Gani Kasuba Dalam Membangun Damai Di Maluku Utara Tahun 1999-2000* Islamic Communication Journal Volume 5, Nomor 1, (Januari-Juni 2020) : 112-113

Tabel II

## Data Masa Priode Kepemimpina Keluarga Kasuba

No.	Nama	Jabatan	Priode
1.	K.H Abdul Gani Kasuba L.C	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DPR RI</li> <li>➤ Wakil Gubernur Maluku Utara</li> <li>➤ Gubernur Maluku Utara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2004 – 2009</li> <li>➤ 2009 – 2013</li> <li>➤ 2013 – 2024</li> </ul>
2.	Dr. H. Muhammad Kasuba M.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dprd Maluku</li> <li>➤ Dprd Maluku Utara</li> <li>➤ Bupati Halmahera Selatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1999 – 2001</li> <li>➤ 2001- 2005</li> <li>➤ 2005 – 2015</li> </ul>
3.	H. Bahrain Kasuba M.Pd	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dprd Kabupaten</li> <li>➤ Dprd Provisini</li> <li>➤ Bupati Halmahera Selatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2004 – 2014</li> <li>➤ 2014- 2015</li> <li>➤ 2016</li> </ul>
4.	Hasan Ali Bassam Kasuba	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wakil Bupati Hakmahera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2020- 2025</li> </ul>

		Selatan	
--	--	---------	--

***Sumber data : Wikipedia***

Tak hanya sebagai calon atau bupati, actor yang memainkan strategi politik di kabupaten hal-sel juga adalah kasuba. Yang menjadi salah satu tokoh dalam mendukung salah satu paslon, dengan posisi dukungan yang dilakukan oleh mantan bupati halsel dua priode yakni Muhammad kasuba sebagai pendukung calon bupati Usman dan Bassam (anak dari Muhammad kasuba) sebagai calon wakil bupati.

Ada yang cukup menarik dalam pesta demokrasi atau pilkada tahun 2020 kemarin, terdapat dua kandidat bakal calon bupati dan wakil bupati hal-sel, yang kedua bakal calon itu merupakan saudara sepupuan dengan posisi Bahrain Kasuba sebagai Bakal calon Bupati dan Bassam Kasuba sebagai bakal calon wakil bupati dengan masing-masing mempunyai pasanagan calon yang berbeda. Tetapi pada saat pendaftaran calon hasilnya Bahrain Kasuba tidak jadi mencalonkan sebagai Bupati hal-sel saat itu, karna factor dukungan partai yang tidak memenuhi syarat.

Dengan demikian bisa dilihat bagaimana posisi actor politik kasuba dalam memegang kendali perpolitikan di Halmahera Selatan, pengaruh yang cukup besar dan lama dipegang membuat posisi keluarga kasuba bisa dibilang menduduki nomor urut satu dalam ranking kekuasaan keluarga di kabupaten Halmahera selatan dengan decade waktu 1999 sampai sekarang atau sekitar 23 tahun lebih lamanya.

Dari penjelasan sub sub bab diatas, peneliti dapat melihat beberapa indicator atau instrument penting yang menjadi kekuatan politik keluarga kasuba sebagai tokoh

politisi yang sangat mempengaruhi dinamika perpolitikan di Kabupaten Halmahera Selatan diantaranya adalah :

### *1. Menjadi Tokoh Agama*

Seperti penjelasan sebelumnya diatas pengaruh tokoh agama merupakan intrumen pertama yang menjadi icon actor politik kasuba dalam perjalan karir politiknya, hal itu terlihat sejak awal mereka terjun ke masyarakat sebagai pendakwah. Jalan mendakwahkan Islam bagi setiap tokoh maupun organisasi yang ada pada tiap daerah mempunyai perbedaannya masing-masing. Hal ini dapat menjadi keragaman pendekatan pada ummat dalam mengenalkan Islam sebagai sebuah agama, terlebih lagi perbedaan itu disesuaikan dengan kondisi dan etnik di setiap daerah. Khususnya Maluku utara yang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik sebagai daerah multietnik.<sup>55</sup>

Maluku utara merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya beragama islam, sehingga masyarakat disana masih berpegang teguh pada prinsip-prinsip dalam beragama terlebih lagi daerah ini merupakan daerah yang sampe sekarang masih memiliki kerajaan kesultanan atas dasar itulah sehingga nuansa islam disana masih sangat kental. Peran kasuba pada tokoh agama juga sangat berpengaruh dalam mengendalikan problem sosial yang ada disana. Hal itu terlihat ketika terjadinya konflik sosial kemudian menjadi konflik agama yang dikenal sebagai peristiwa kelam 1999. Peristiwa ini juga yang pertama kali membuat nama kasuba terkenal ke seluruh penjuru masyarakat Maluku utara.

---

<sup>55</sup> Ibid

## ***2. Menjadi Tokoh Pendidikan***

Tokoh pendidikan juga merupakan satu factor penting yang melatar belakangi jalan politik keluarga kasuba, hal ini terlihat pada awal perjalanan karir dakhwah dan pendidikan keluarga kasuba. Pendidikan pada waktu itu cukup dibilang sangat penting atau sangat berpengaruh terlebih lagi pendidikan pada waktu itu sangat sulit untuk dijangkau oleh masyarakat disana. Tinggi rendahnya pendidikan juga merupakan satu peluang yang sangat besar dimata masyarakat dalam memilih seseorang untuk dijadikan pemimpin.

Ada dua tokoh actor politik kasuba yang sangat disoroti persoalan latar belakang pendidikannya, yakni K.H Abdul Gani Kasuba Lc dan Dr H Muhammad Kasuba MA, karna kedua tokoh ini memiliki gelar pendidikan di Luar negeri yang mana K.H Abdul Gani Kasuba sebagai alumni pendidikan tinggi di Islamic University of al-Madinah al-Munawarah, sedangkan Dr H Muhammad Kasuba adalah alumni pendidikan tinggi International Islamic University Abad Pakistan. Dengan latar belakang itulah masyarakat mengagumi dan juga menjadikannya mereka sebagai sosok teladan dan tokoh pendidikan di Maluku utara.

Pengaruh pendidikan itu juga terlihat ketika sosok K.H Abdul gani Kasuba pulang dari Madinah, beliau kemudian mengabdikan diri kepada Yayasan Al-Khairat dengan mengambil posisi sebagai Kepala Inspeksi Alkhairaat. Selama 25 tahun berkarir di Alkhairaat beliau mendirikan sekolah-sekolah di berbagai daerah terpencil dari Maluku Utara hingga Papua, sekaligus menerapkan ilmu yang dipelajarinya di Fakultas Dakwah saat di Madinah. Inilah yang kemudian mengangkat nama beliau

dan Marga kasuba di seluruh pelosok daerah khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan.

Hal ini sejalan dengan Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bapak Hasan Ali Bassam Kasuba selaku Wakil Bupati Halmahera Selatan mengatakan :

“Marga Kasuba pertama kali dikenal oleh masyarakat Maluku utara itu ketika ustad abdul gani kasuba mengabdikan dirinya di Alkhairaat dan membangun sekolah-sekolah serta yayasan Alkhairaat di pelosok daerah yang ada di Maluku utara”<sup>56</sup>

Sedangkan yang dilakukan oleh adiknya, Dr Muhammad Kasuba dalam mempengaruhi situasi politik di Halmahera Selatan, Yakni ketika menjabat sebagai Bupati beliau membuat kebijakan pada program pemerintahannya yaitu pendidikan gratis dan kesehatan gratis kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga masyarakat disana merasa sangat terbantu dengan program yang beliau buat mengingat pendidikan dan kesehatan disana cukup terbilang mahal. Hal ini juga membuat masyarakat memilih beliau untuk menjadi Bupati selama dua priode serta menjadikan patron bagi actor politik kasuba dalam meneruskan regeneasi kepemimpinan setelah beliau.

Hal ini sejalan dengan hasil waawancara yang peneliti lakukan dengan bapak sumarlin suardi selaku masyarakat desa kasiruta beliau mengatakan bahwa :

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan Ali Bassam Kasuba Selaku *Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan* 9 Mei 2022

”pengaruh yang dibangun oleh muhammad kasuba ketika menjabat sebagai bupati dan meneruskan kepemimpinannya selama dua priode itu adalah saat beliau membuat program pendidikan gratis dan kesehatan gratis”<sup>57</sup>

### **3. *Memiliki Suku Terbesar***

Kondisi politik di Halmahera selatan juga bisa dibilang sangat kental dengan nuansa suku. Sehingga konstestasi politik di Halmahera Selatan tidak terlepas dari yang namanya peran serta mobilisasi masa pendukung yang berlatar belakang suku yang sama. Hal ini terlihat pada track record actor politik kasuba yang cukup disoroti pada kontetestasi Perpolitikan di Kabupaten Halmahera selatan di karenakan keluarga kasuba berasal dari suku Tobelo Galela (TOGALE) yang merupakan suku yang cukup besar di Maluku utara khususnya kabupaten Halmahera Selatan sehingga keikut sertaan actor politik kasuba dalam konstestasi politik bisa dibilang sangat berpotensi untuk menang.

Dari penjelasan di atas peneliti akan menyimpulkan bagaimana kekuatan politik keluarga kasuba mencoba mempengaruhi, mengontrol dan memberikan kekuasaan penuh terhadap regenerasi kepemimpinan, menjaga elektabilitas serta eksistensi politik di Kabupaten Halmahera Selatan. Hasil kesimpulan dari peneliti kemudian akan di jabarkan dan di jelaskan pada bab selanjutnya yakni pada bab V atau bab kesimpulan.

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Sumarlin Suardi Selaku *Masyarakat Desa Kasiruta Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan* 08 Mei 2022

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh politik keluarga kasuba dalam perpolitikan di kabupaten Halmahera selatan (studi kasus di kabupaten Halmahera selatan), maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh penulis bahwasanya Praktik kekuasaan dengan “memberi” posisi anggota keluarga dalam struktur kekuasaan atau sering disebut dengan politik keluarga di demokrasi Indonesia merupakan situasi demokrasi yang mengikat dan berkelanjutan, pertarungan politik yang berhubungan antara keluarga (*politik keluarga*) ini, menjadi satu senjata yang kuat bagi seorang dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah.

Ada dua hal yang mendasari terjadinya pengaruh politik keluarga dalam demokrasi Indonesia, yaitu *Pertama*, macetnya kaderisasi partai politik dalam menjaring calon kepala daerah yang berkualitas, sehingga menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan sanak keluarga kepala daerah untuk menjadi pejabat publik. *Kedua*, konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi status quo di daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan petahana.

2. Pengaruh politik keluarga kasuba dalam perpolitikan di kabupaten Halmahera selatan tidak terlepas dari kondisi adat, budaya serta kultur yang dipegang teguh oleh masyarakat, hal ini merupakan egosentris masing-masing masyarakat yang ingin mempertahankan kekuasaan kelompoknya, dengan melihat latar belakang suku atau keluarga, sehingga kontestasi politik yang terjadi di Halmahera selatan selama 4 dekade ini di dominasi oleh politik keluarga dalam hal ini adalah actor politik kasuba. Faktor yang berpengaruh dalam perjalanan karir politik Keluarga Kasuba juga tidak terlepas dari peran tokoh agama dan latar belakang pendidikannya yang merupakan peluang besar dan mendominasi actor politik kasuba sehingga mendapatkan posisi strategis di pemerintahan kabupaten Halmahera selatan.

### ***B. Saran Saran***

Adapun saran yang penulis maksud yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam upaya mewujudkan elektabilitas demokrasi Indonesia yang baik untuk politik bangsa, maka kita perlu mewarisi nilai-nilai politik yang bermoral sehingga politik keluarga terlihat bijaksana dan tidak menurunkan elektabilitas demokrasi di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh bapak roky gerung bahwa “politik keluarga adalah hal yang manusia tetapi dia menjadi tidak baik ketika kita mengharapkan kekuasaan yang diwarisi dan mengingikan harta dari kekuasaan itu”.

2. Peneliti mengharapkan agar masyarakat bisa melihat potensi dari actor politik yang ingin menjadi pemimpin, agar kiranya memiliki kredibilitas sebagai seorang pemimpin sehingga terciptanya demokrasi yang baik untuk kemajuan demokrasi di Indonesia khususnya di kabupaten Halmahera selatan. Peneliti juga mengharapkan agar actor politik keluarga di Indonesia bisa menjadikan actor politik kasuba sebagai acuan dalam mempengaruhi situasi politik di kabupaten Halmahera selatan

## DAFTAR PUSTAKA

- Bawazir, Tohir. *Jalan Tengah Demokrasi*, cet. I ; Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Ramadhan, Raden Romy Achmad. “Menyelamatkan Demokrasi,” 11, 2019.
- Haboddin, Muhtar. *Politik Keluarga Dalam Pilkada Serentak*,( Terbitan 2006).
- Almond, Gabriel A. dalam Basri Seta. *Pengantar Ilmu Politik*, : Jogjakarta: Indie Book Corner. 2011.
- Kbbi V. *Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa Dan Pembakuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.*
- Pemda Hal-Sel, *Profil Kabupaten Halmahera Selatan.*
- Suyadi. Mahasiswa (S1) Ilmu Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yokyakarta Yang Berjudul “*Bentuk Dan Karakter Politik Di Indonesia*”, 2014.
- Ramadhan, Ilham. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Prodi Ilmu Politik ; “*Politik Dinasti Di Aceh*” (*Studi Kasus Kabupaten Nagan Raya*), 2018.
- Muksin, Dafrin. Titin Purwaningsih, Achmad Nurmandi. “*Praktik Politik Di Aras Lokal Pasca Reformasi: Studi Kasus Abdul Gani Kasuba Dan Ahmad Hidayat Mus Pada Pilkada Provinsi Maluku Utara*”, jurnal wacana politik 4, no 2 (2019).
- Imam, Hidajat. *Teori-Teori politik*, : Malang: Setara press : 2009.
- Seta, Basri. *Pengantar Ilmu Politik*, Jogjakarta: Indie Book Corner :2011.

- Departemen P dan K, Kamus Besar Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, cet. Ke-8, 1995.
- Budiarjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama ; 2007.
- Almond, Gabriel A. dalam Basri Seta. *Pengantar Ilmu Politik*, Jogjakarta: Indie Book Corner.
- Ibid. Heywood, Andrew. dalam Budiardjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Ramlan, Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 1992.
- Merkl, Peter. dalam Budiardjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Nambo, Abdulkadir B. Muhammad Rusdiyanto. *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik* 21. No. 2, 2015.
- Djati, Wasisto Raharjo. Pusat Kajian Sosiologi Fisip-Ui. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, 2013.
- Ibid. Djati, Wasisto Raharjo. dipublikasi Oleh Pusat Kajian Sosiologi Fisip-Ui. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, 2013
- Rosalina, winda Affendi, Jurnal Trias Politika, “*Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten*” (Vol 2. No.2 : Oktober 2018)
- Ibid. Djati, Wasisto Raharjo. dipublikasi Oleh Pusat Kajian Sosiologi Fisip-Ui. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, 2013.

- Ibid. Djati, Wasisto Raharjo. dipublikasi Oleh Pusat Kajian Sosiologi Fisip-Ui. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, 2013.
- Ibid, Djati, Wasisto Raharjo. dipublikasi Oleh Pusat Kajian Sosiologi Fisip-Ui. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, 2013.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zainal Asikin, dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suwandi, dan Basrowi, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Syatori Nasehudin, Toto dan Nanang Gozali. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta, 1997.
- Nasution, N. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Cet; VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Ibid, Rosalina winda Affendi, *Jurnal Trias Politika*, “*Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten*” Vol 2. No.2 : Oktober 2018

<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?Newdetail&Detailtetap=1667>. Diakses

*Pada Taggal 07 Juli 2022*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan

Polisiri Marwan, *Sang Pendakwah Kiyai Haji Abdul Gani Kasuba, Lc. "Sebuah Manifestasi Jejak Kepemimpinan Kharismatik Maluku Utara*. (Penerbit Merah Putih, 2019).

Wasisto Raharjo Djati, Pusat Kajian Sosiologi Fisip-Ui. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, (Juli 2013)

Ibid

Hasil wawancara dengan bapak *Muhammad Rizal (pengamat politik di Halmahera selatan)*, 6 Mei 2022

Winda Rosalina Affendi, *Jurnal Trias Politika, "Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten"* (Vol 2. No.2 : Oktober 2018)

Ibid, Djati Wasisto Raharjo, dipublikasi Oleh Pusat Kajian Sosiologi Fisip-Ui. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, (Juli 2013)

Ibid

Ibid Affendi, Winda Rosalina, *Jurnal Trias Politika, "Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten"* (Vol 2. No.2 : Oktober 2018)

Alfia Abdullah Siti Alfia Nur,*Dakwah Abdul Gani Kasuba Dalam Membangun Damai Di Maluku Utara Tahun 1999-2000* Islamic Communication Journal Volume 5, Nomor 1, (Januari-Juni 2020)

Hasil Wawancara Dengan Bapak Hanafi Ali Selaku *Tokoh Masyarakat Desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan* 11 mei 2022

Ibid Alfia Abdullah, Siti Alfia Nur,*Dakwah Abdul Gani Kasuba Dalam Membangun Damai Di Maluku Utara Tahun 1999-2000* Islamic Communication Journal Volume 5, Nomor 1, (Januari-Juni 2020)

Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Hi Usman Selaku *pengamat politik Kabupaten Halmahera Selatan* 9 Mei 2022

Ibid Alfia Abdullah, Siti Alfia Nur,*Dakwah Abdul Gani Kasuba Dalam Membangun Damai Di Maluku Utara Tahun 1999-2000* Islamic Communication Journal Volume 5, Nomor 1, (Januari-Juni 2020)

Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan Ali Bassam Kasuba Selaku *Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan* 9 Mei 2022

Hasil Wawancara Dengan Bapak Sumarlin Suardi Selaku *Masyarakat Desa Kasiruta Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan* 08 Mei 2022

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Kapan terbentuknya kabupaten Halmahera selatan?
2. Berapa jumlah desa dan kecamatan di kabupaten Halmahera selatan ?
3. Apa saja mata pencarian masyarakat di kabupaten Halmahera selatan ?
4. Apa yang melatar belakangi terjadinya politik keluarga dalam demokrasi di Indonesia ?
5. Bagaimanakah silsilah keluarga kasuba ?
6. Sejak Kapan keluarga kasuba memimpin kabupaten Halmahera selatan?
7. Berapa priode keluarga kasuba dalam memimpin kabupaten Halmahera selatan ?
8. Bagaimana pengaruh keluarga kasuba dalam perpolitikan di kabupaten Halmahera selatan ?

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak K.H Abdul Gani Kasuba Lc



Wawancara dengan Bapak Bahrain Kasuba M.Pd



Wawancara dengan Bapak Hasan Ali Bassam Kasuba



Wawancara dengan Bapak Hanafi Ali



Wawancara Dengan Bapak Ahmad Usman

**BIODATA DIRI****A. Identitas Diri**

Nama : Muhammad Syahrul Soulisa  
NIM : 182170005  
TTL : labuha, 01 januari 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jln Lasoso Lorong I  
Fakultas : Ushulludin Adab Dan Dakwah  
Prodi : Pemikiran Politik Islam  
Agkatan : 2018  
No. Hp : 081244382038  
Email : muhsyahrulsoulisa@gmail.com

**B. Identitas Orang Tua**

Nama Ayah : Bader soulisa  
Pekerjaan : Swasta  
Nama Ibu : Dahlia usman  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Desa labuha

**C. Riwayat Pendidikan**

1. SD/MI : SD Alkhairaat Labuha
2. SMP/MTS : MTs Alkhairaat Labuha Bacan
3. SMA/MA : MA Alkahiraat Labuha

4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negri (UIN) Datokarama Palu

D. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Himpunan Mahasiswa Pemikiran Politik Islam 2020
2. Wakil Dema Uin Datokarama Palu 2021
3. Korwil Bem/Dema Sulawesi Regional Sulteng 2021
4. Korda Bemnus Reginal Sulteng 2021
5. Anggota Ldk Al Abrar Uin Datokarama Palu
6. Anggota Kammi Komsat Uin Datokarama Palu
7. Anggota Genbi Komsat Uin Datokarama Palu